

**ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PERNYATAAN INDONESIA DAN
MALAYSIA DALAM MELAWAN DIKRIMINASI KOMODITAS MINYAK
KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA PADA TAHUN 2023**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Universitas Bakrie, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Bakrie**



Oleh:

Nurul Khaliza Ferliana

1171004046

**Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Bakrie**

Jakarta

2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Khaliza Ferliana

NIM : 1171004046

Kelas : Tugas Akhir

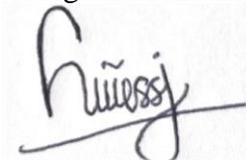
Jumlah Kata : 16.719 Kata

Referensi : 52 Referensi

Menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa ada unsur plagiat baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Karya tulis ini belum pernah dipakai dengan konten yang sama, untuk proyek, laporan dan tugas di kelas yang lain.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka dan telah mengikuti prosedur *quotation* yang benar.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi kode etik atau sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan dunia pendidikan, dan dianggap gagal dengan nilai (F) di mata kuliah Tugas Akhir.

Jakarta, 26 Agustus 2024



Nurul Khaliza Ferliana

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Nurul Khaliza Ferliana

NIM : 1171004046

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Skripsi : Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Indonesia
Dan Malaysia Dalam Melawan Diskriminasi Komoditas
Minyak Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Pada Tahun 2023

Telah berhasil menyelesaikan revisi proposal tugas akhir dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan dalam mengikuti sidang tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Dr. Muhammad Badaruddin, S.Sos., M.Sc., M.A.

Pembahas I : Yudha Kurniawan, S.Sos., M.A.

Pembahas II : Insan Harapan Harahap, S. Sos, M. AP

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 26 Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie—institusi pendidikan yang menjadi tempat belajar dan menimba ilmu bagi penulis. Dalam proses penelitian tugas akhir serta selama masa perkuliahan, penulis mendapatkan pengetahuan, bantuan, kritik serta saran, dukungan dan pengalaman yang tidak ternilai. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Bakrie yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Bakrie.
2. Dr. Muhammad Badaruddin, S.Sos., M.Sc., M.A selaku dosen pembimbing skripsi atas segala ilmu dan pengetahuan serta bimbingan yang diberikan selama masa perkuliahan.
3. Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos, M.Litt selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik dan selaku dosen pembimbing akademik, selama penulis berkuliah yang selalu membantu memberi saran dan masukan terkait perkuliahan.
4. Yudha Kurniawan, S.Sos., M.A dan Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukkan pada saat sidang proposal maupun sidang tugas akhir sehingga skripsi saya dapat selesai dengan baik.
5. Ayah penulis Enriko Pakaya, Ibu penulis Alianora M Tumimomor, Adik penulis Fachrial Firmansyah Pakaya dan keluarga besar penulis atas segala dukungan yang tanpa henti diberikan baik dalam bentuk do'a, moral serta dukungan secara material maupun nonmaterial. Tanpa motivasi dan peranan mereka saya tidak dapat sampai sejauh ini.
6. Sahabat – sahabat dekat penulis yang telah sama – sama berjuang selama masa perkuliahan, membantu, menyemangati dan mendukung penulis, Alfisyahriin Chusnaini, Divo Aditya Pramaputra, Naufal Rayhan Muhamad, Andrian Dwi

Kurniawan, Fahmi Gozali, Anisyah Anna Arbaha Jamaluka, Ahmad Rifqi dan Fawwaz Apdipandya.

7. Seluruh member NCT 127 dan THE BOYZ terutama Jeong Jaehyun dan Lee Juyeon yang secara tidak langsung sudah menjadi penyemangat dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada diri saya sendiri yang selalu berjuang, berdo'a, dan berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta terus mencoba untuk memperbaiki diri, dan mohon maaf serta terima kasih tidak lupa kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya selama proses perkuliahan maupun penulisan skripsi. Semoga skripsi saya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Nurul Khaliza Ferliana

HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Khaliza Ferliana
NIM : 1171004046
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas Akhir : Penelitian Kualitatif

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalt Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

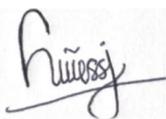
“ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PERNYATAAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MELAWAN DIKRIMINASI KOMODITAS MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA PADA TAHUN 2023”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Dibuat di Jakarta

Tanggal 26 Agustus 2024



Nurul Khaliza Ferliana

ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PERNYATAAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MELAWAN DIKRIMINASI KOMODITAS MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA PADA TAHUN 2023

Nurul Khaliza Ferliana

ABSTRAK

Komoditas kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu komoditas yang berperan besar di dalam sektor energi, industri, hingga berbagai pemenuh kebutuhan rumah tangga lainnya. Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu eksportir komoditas kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia dengan menyumbang volume produksi sebesar 66,3% pada tahun 2022. Indonesia dan Malaysia memiliki peranan yang sangat penting dan posisi yang kuat dalam menentukan keberlangsungan rantai pasok komoditas kelapa sawit di dunia. Prospek yang besar pada kemajuan industri dan kemajuan ekonomi tersebut ternyata memiliki tantangan tersendiri pada isu lingkungan. Salah satu importir kelapa sawit dari Indonesia-Malaysia adalah Uni Eropa. Pada bulan Desember 2022, Uni Eropa menyetujui pemberlakuan aturan terbaru yang melarang jual-beli minyak kelapa sawit dan/atau komoditas lain yang sejenis yang mengakibatkan adanya aktivitas deforestasi melalui UU Anti-Deforestasi / EUDR. Hal tersebut berdampak pada pembatasan kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia. Para pemimpin Indonesia-Malaysia dari kalangan pemerintah maupun profesional pun menyatakan beberapa wacana untuk merespon hadirnya kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis wacana terhadap para pemimpin Indonesia-Malaysia dalam menghadapi diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep analisis wacana kritis Teun Van Dijk, yang terdiri dari tindakan, konteks, histori, kekuasaan, ideologi, kognisi sosial, dan wacana dalam konteks sosial. Adapun studi ini mencakup beberapa wacana yang disampaikan oleh beberapa tokoh seperti Presiden RI Jokowi, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartanto, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi, dan Dirjen MPOB Ahmad Parveez. Hasil analisis menunjukkan bahwa para pemimpin tersebut menggunakan strategi wacana untuk menekankan kerjasama bilateral, pentingnya minyak kelapa sawit bagi perekonomian nasional, dan upaya untuk melawan persepsi negatif dalam rangka memperkuat daya tawar dan posisi di dunia internasional terutama terhadap Uni Eropa. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa wacana yang digunakan oleh para pemimpin Indonesia-Malaysia tersebut memainkan peran penting untuk membentuk persepsi publik dan mendukung kebijakan pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional dalam rangka memperkuat daya tawar.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Diskriminasi, EUDR, Indonesia, Kelapa Sawit, Malaysia, Paradigma Kritis, Uni Eropa

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF INDONESIA AND MALAYSIA'S STATEMENTS IN COMBATING PALM OIL DISCRIMINATION BY THE EUROPEAN UNION IN 2023

Nurul Khaliza Ferliana

ABSTRACT

Palm oil (CPO) is a commodity that plays a significant role in the energy sector, industry, and various household needs. Indonesia and Malaysia are among largest exporters of palm oil (CPO) globally, contributing 66,3% of global production volume in 2022. Indonesia and Malaysia hold a crucial role and strong position in determining the sustainability of the global palm oil supply chain. Despite the promising prospects for industrial and economic advancement, there are environmental challenges associated with this commodity. One of the major improters of palm oil from Indonesia and Malaysia is European Union. In December 2022, the European Union determined the implementation of a new regulation that bans the trade of palm oil and/or similar commodities linked to deforestation activities through the European Union Deforestation Regulation (EUDR). This regulation has impacted the restriction of palm oil imports from Indonesia and Malaysia. Leaders from both Indonesia and Malaysian governments and professionals have made several statements in response to this policy. This study aims to conduct a discourse analysis of the statements made by Indonesia and Malaysian leaders in addressing the palm oil discrimination by the European Union. The research methodology is qualitative approach using Teun Van Dijk's critical discourse analysis framework, which includes action, context, history, power, ideology, social cognition, and discourse in a social context. This study encompasses several discourses delivered by key figures such as Indonesian President Jokowi, Indonesia's Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartanto Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Vice Prime Minister Fadillah Yusof, GAPKI's Head of Communication Tofan Mahdi, and MPOB's General Director Ahmad Parveez. The analysis results indicate that the leaders utilize discourse strategies to emphasize bilateral cooperation, the importance of palm oil to the national economy, and efforts to combat negative perception in order to strengthen bargaining power and international standing, particularly with the European Union. The study also concludes that the discourses used by Indonesian and Malaysian leaders play a vital role in shaping public perceptions and supporting government policies to protect national interest and strengthen the bargaining positions.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Discrimination, EUDR, Indonesia, Palm Oil, Malaysia, Critical Paradigm, European Union

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	7
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Pertanyaan Penelitian	14
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.6 Manfaat Penelitian	15
1.7 Sistematika penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
2.1 Teori Kritis (<i>Critical Theory</i>).....	18
2.2 Analisis Wacana Kritis.....	21
2.3 Alur Berpikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Metode Penelitian.....	28
3.2 Unit Analisis.....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Teknik Pengolahan Data	32
3.5 Teknik Penyajian Data	33

3.6 Teknik Analisis Data.....	33
3.7 Teknik Penarikan Kesimpulan	34
3.8 Operasional Konsep	34
BAB IV ANALISIS	36
4.1 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Presiden Indonesia, Jokowi, Untuk Memerangi Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa.....	37
4.2 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi, Untuk Indonesia Perlu Memperkuat Kerjasama Hadapi Diskriminasi Minyak Sawit oleh Uni Eropa	42
4.3 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof, Mengajak Indonesia Untuk Stop Ekspor Kelapa Sawit ke Uni Eropa (12 Januari 2023)	47
4.4 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Dirjen Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Ahmad Parveez Ghulam, Tentang Strategi Untuk Menekan Uni Eropa Berkaitan Dengan Isu Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa .	51
4.5 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, Tentang Ajakan Untuk Kerjasama Melawan Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa	54
4.6 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, Mengajak Indonesia Untuk Terus Berkolaborasi Memerangi Diskriminasi Sawit Malaysia	58
4.7 Analisis Kognisi Sosial	61
4.8 Wacana Dalam Konteks Sosial	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sepuluh Negara Penghasil Sawit Terbesar di Dunia Tahun 2022	1
Tabel 2. Perbandingan Pendekatan Analisis Wacana Kritis (Sumber: Masitoh, 2020)	24
Tabel 3. Unit Analisis Penelitian	29
Tabel 4. Daftar Sumber Data Sekunder	30
Tabel 5. Operasionalisasi Konsep Penelitian	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komparasi Penelitian Terdahulu	8
Gambar 2. Alur Berpikir Penelitian	26
Gambar 3. Proses Teknik Pengolahan Data	33
Gambar 4. Model Analisis Wacana Kritis Van Dijk.....	34
Gambar 5. Presiden Joko Widodo Berbincang dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam Pertemuan Bilateral di Istana Bogor Membahas Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa.....	37
Gambar 6. Tofan Mahdi sebagai Ketua Bidang Komunikasi GAPKI dalam Wawancara Virtual dengan CNBC	42
Gambar 7. Pemberitaan Terkait Pernyataan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof Mengajak Indonesia Untuk Stop Ekspor Kelapa Sawit ke Uni Eropa	47
Gambar 8. Pemberitaan Terkait Pernyataan Dirjen Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Ahmad Parveez Ghulam tentang Strategi Untuk Menekan Uni Eropa Berkaitan dengan Isu Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa.....	51
Gambar 9. Pemberitaan Terkait Pernyataan Menteri Koordinator Ekonomi RI, Airlangga Hartanto, tentang Kesepakatan Indonesia-Malaysia Lawan Diskriminasi Uni Eropa.....	54
Gambar 10. Pemberitaan Terkait Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, tentang Kolaborasi Indonesia-Malaysia Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit Uni Eropa	58
Gambar 11. Buku Kajian Respon CSO's (Civil Society Organization) Indonesia terhadap Kesepakatan Final Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa.....	67
Gambar 12. Respon Masyarakat terhadap Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Melawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa melalui kolom komentar Youtube Kompas	68
Gambar 13. Respon Masyarakat terhadap Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Melawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa melalui kolom komentar Youtube Metro TV	68
Gambar 14. Respon Masyarakat terhadap Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Melawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa melalui kolom komentar Youtube The Stars (Media Malaysia)	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang berperan besar di dalam sektor energi, industri, hingga berbagai pemenuh kebutuhan rumah tangga lainnya. Pada sektor energi, kelapa sawit digunakan sebagai bahan bakar *biofuel*. Pada sektor industri, minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan barang-barang *consumer goods* karena dianggap sebagai salah satu komoditas yang produktif dibanding minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak lobak (Barthel, 2018). Selain *consumer goods*, minyak kelapa sawit tersebut digunakan sebagai campuran dari barang-barang kosmetik yang memiliki pangsa pasar yang tinggi di dunia. Kebutuhan akan komoditas kelapa sawit meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya populasi manusia di dunia. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan, permintaan (*demand*) minyak sawit diprediksi mengalami peningkatan sebesar 56 Juta ton atau sebesar 24,3% pada tahun 2050 dari 2015 yang sudah mencapai 174 juta ton (Ling, 2019).

Perlu diketahui bahwa produksi komoditas kelapa sawit khususnya CPO terbesar (tiga besar) didominasi oleh negara-negara Asia pada tahun 2022 sesuai yang disajikan melalui tabel berikut (Index Mundi, 2022):

Tabel 1. Sepuluh Negara Penghasil Sawit Terbesar di Dunia Tahun 2022

(Sumber: Index Mundi, 2022)

No	Negara	Volume (Juta Ton)	Lokasi (Benua)
1	Indonesia	46,5	Asia
2	Malaysia	19,8	Asia
3	Thailand	3,26	Asia
4	Kolombia	1,84	Amerika Selatan
5	Nigeria	1,4	Afrika
6	Ekuador	0,91	Amerika Selatan
7	Papua Nugini	0,65	Oceania
8	Honduras	0,6	Amerika Tengah
9	Pantai Gading	0,6	Afrika

10	Brazil	0,57	Amerika Selatan
----	--------	------	-----------------

Berdasarkan data di atas, produsen kelapa sawit (CPO) didominasi oleh negara-negara di benua Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia dengan volume produksi 46,5 Juta ton, Malaysia dengan volume produksi sebesar 19,8 Juta ton, dan diikuti oleh Thailand dengan volume produksi sebesar 3,26 Juta ton. Perlu diketahui, Indonesia-Malaysia merupakan dua negara penyumbang volume produksi sawit dunia sebesar 66,3% pada tahun 2022. Artinya, Indonesia dan Malaysia pada sektor ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi harga minyak sawit dunia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan aktor hegemoni sawit di dunia. Selain itu, masifnya kenaikan jumlah produksi sawit tersebut tidak terlepas dari manfaat yang begitu luas dan prospek yang begitu besar dalam kemajuan ekonomi. Bahkan hasil samping dari sawit (hasil selain CPO) tersebut sedang dilakukan penelitian dalam rangka memaksimalkan potensi kelapa sawit. Menurut laporan dari FAO (*Food and Agricultural Organization*) PBB, permintaan terhadap minyak sawit akan terus meningkat hingga tiga kali lipat pada tahun 2050 (FAO, 2022).

Prospek yang besar pada kemajuan industri dan kemajuan ekonomi tersebut ternyata memiliki tantangan tersendiri pada isu lingkungan. Isu yang beredar di dunia adalah dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas industri kelapa sawit bagi kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi perhatian khusus masyarakat dunia, khususnya PBB mengingat salah satu agenda PBB adalah merealisasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mana isu lingkungan menjadi aspek penting di dalamnya. Uni Eropa (UE) menjadi salah satu bagian dari komunitas internasional yang terdiri dari negara-negara berpendapatan tinggi di dunia yang sangat mengambil perhatian pada isu lingkungan. Uni Eropa (UE) juga berkomitmen untuk merealisasikan salah satu agenda SDGs tersebut dengan mengimplementasikan pengembangan energi baru-terbarukan (*Renewable Energy*) dengan memanfaatkan bahan baku minyak nabati (*Biofuel*). Bahan baku yang menjadi dasar pembuatan *biofuel* tersebut juga perlu diperhatikan sedemikian rupa pada proses *end-to-end*-nya. Uni Eropa (UE)

menganggap bahwa aktivitas produksi *biofuel* tanpa memperhatikan *end-to-end* proses pada bahan bakunya adalah sebuah fenomena yang paradoksial. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh sekelompok peneliti di UE pada tahun 2016 melakukan riset berkaitan dengan minyak nabati yang dihasilkan oleh kelapa sawit dan kelompok minyak sejenis lainnya menunjukkan adanya korelasi positif terhadap efek samping negatif terhadap lingkungan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada kuantitas produksi yang sama, produksi minyak kelapa sawit memberikan efek samping negatif pada lingkungan jika dibandingkan dengan komoditas yang sejenis lainnya, seperti bunga matahari dan kedelai (Vijay, 2017). Padahal, untuk volume produksi yang sama, sawit cenderung menggunakan luas lahan yang relatif sedikit dibanding dengan komoditas sejenis lainnya. Hal ini kemudian menimbulkan paradoks bahwa sesungguhnya sawit mampu menekan angka penggunaan luas lahan, namun justru membuat tingkat kerusakan yang lebih besar. Selain itu, 45% ekspansi sawit pada wilayah yang memiliki tingkat karbon tinggi dan mayoritas di wilayah hutan tropis di Asia Tenggara. Faktanya, Asia Tenggara menyumbang 25% hutan tropis di dunia, namun dalam beberapa tahun ke belakang justru digunakan sebagai lahan produksi sawit (European Parliament, 2019).

Uni Eropa melihat fakta-fakta yang terjadi pada sawit ini melalui riset dan menyimpulkan bahwa produksi minyak sawit justru memberikan efek negatif terhadap lingkungan dengan salah satu wujud nyatanya adalah meningkatnya aktivitas deforestasi. Hal ini tidak selaras dengan salah satu tujuan SDGs, yaitu keberlanjutan lingkungan. Tujuan ini lah yang menjadi landasan oleh UE untuk membatasi penggunaan minyak sawit sebagai bahan *biofuel*, industri *consumer goods*, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Khusus untuk *biofuel*, UE merespon dengan merevisi *Renewable Energy Directive* (RED) yang berisi perjanjian tentang perubahan bahan bakar fosil ke energi baru-terbarukan untuk tahun 2020-2030. Adapun salah satu bahan bakar yang digunakan di dalam energi baru-terbarukan adalah *biofuel* yang berbahan baku kelapa sawit. Revisi tersebut mewujudkan menjadi RED II (tahun 2019) yang salah satunya berisi tentang kriteria-kriteria *biofuel* yang jelas mengurangi penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakunya, seperti bebas deforestasi, tidak menimbulkan kadar karbon tinggi, dan

tidak ditanam di daerah yang kaya akan biodiversitas atau nilai alam tinggi. Selain masalah lingkungan, industri minyak kelapa sawit juga dinilai oleh UE merupakan salah satu industri yang problematik pada konteks sosial. Adapun beberapa isu yang disoroti oleh parlemen UE dalam hal ini adalah isu korupsi, memperkerjakan anak usia di bawah umur, pelanggaran HAM, dan hak-hak masyarakat adat yang dirampas tanahnya untuk dibukakan lahan sawit (Rifin, 2020). Alasan-alasan inilah yang kemudian dapat mendiskualifikasi minyak sawit dari bahan baku *biofuel* yang diproduksi. Selain itu, dalam RED II, pemakaian minyak kelapa sawit ditargetkan menjadi 0% pada tahun 2030 (Simon, 2018).

Dengan membatasi penggunaan minyak kelapa sawit oleh UE, hal ini berkonsekuensi kepada menurunnya volume impor minyak sawit (CPO) ke pasar Eropa. Terbukti bahwa dalam lima tahun terakhir (2016-2020), volume impor minyak sawit di pasar Eropa menurun drastis. Berdasarkan data dari Eurostat, dapat diketahui bahwa penurunan selama 2016-2020 mencapai 17% selama rentang 2016-2020 (Eurostat, 2021). Hal ini merupakan suatu bukti komitmen UE untuk membatasi penggunaan bahan baku minyak sawit sesuai yang dicanangkan pada RED II. Uniknya, mayoritas eksportir sawit di pasar Eropa adalah Indonesia-Malaysia yang merupakan eksportir minyak sawit (CPO) terbesar di dunia. Dengan adanya pengurangan volume sawit tersebut, negara-negara yang tergabung di Uni Eropa memilih alternatif untuk menggunakan komoditas yang sejenis, yaitu biji bunga matahari atau kedelai yang meningkat penggunaannya dari tahun ke tahun karena resiko deforestasinya tidak sebesar yang dihasilkan jika menggunakan sawit (Rifin, 2020). Secara langsung maupun tidak langsung, tren ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap komoditas minyak sawit karena dianggap memberikan efek negatif kepada lingkungan dan sosial, sehingga dianggap layak untuk dilakukan pengurangan dalam volume penggunaan. Selain itu, pada tahap tertentu, hal ini juga berlanjut pada potensi kerugian yang diterima oleh negara-negara produsen sekaligus eksportir sawit dari segi ekonomi berupa pengurangan pangsa pasar.

Indonesia dan Malaysia pada dasarnya memiliki cetak biru kebijakan terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang disebut *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO)*

(Pasimura dkk, 2022). ISPO dan MSPO merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing minyak sawit di pasar dunia dan penanaman sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kebijakan tersebut berupa sertifikasi terhadap segala aktivitas di dalam perkebunan sawit mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi yang di dalamnya terdapat prinsip dan kriteria tertentu (Liu & Wang, 2021). Sertifikasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir tersebut dianggap sudah sesuai dengan standar internasional. Namun, dengan masih adanya pembatasan komoditas kelapa sawit (CPO) yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut memberikan sinyal bahwa adanya indikasi kegagalan diplomasi ekonomi kedua negara kepada Uni Eropa, sehingga terjadi kriteria yang terdapat di dalam sertifikasi ISPO dan MSPO tersebut tidak sesuai dengan uji tuntas yang dimiliki oleh Uni Eropa. Selain itu, dalam perspektif perang dagang, terdapat hambatan eksternal berupa kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk mengamankan produk minyak nabati lokal, seperti biji bunga matahari dan kedelai yang dinilai mampu menggantikan peran minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati karena dianggap memiliki daya rusak terhadap lingkungan yang relatif rendah dibanding kelapa sawit (Kinseng dkk, 2023).

Pada bulan Desember 2022, Uni Eropa menyetujui pemberlakuan aturan terbaru yang melarang jual-beli minyak kelapa sawit dan/atau komoditas lain yang sejenis yang mengakibatkan aktivitas deforestasi melalui UU Anti-Deforestasi Uni Eropa. Adapun jual-beli minyak sawit di pasar Eropa dapat berlaku apabila para importir dapat membuktikan bahwa produksi mereka tidak mengakibatkan adanya deforestasi (Hariandja, 2022). Hal ini membuat para importir minyak sawit geram dengan keputusan Uni Eropa tersebut, khususnya Indonesia-Malaysia, mengingat dua negara tersebut merupakan importir terbesar pada komoditas minyak sawit di pasar Eropa. Pemerintah Malaysia kemudian mengajak pemerintah Indonesia untuk melakukan pemberhentian ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa sebagai respon atas kebijakan peraturan deforestasi tersebut melalui pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof pada Januari 2023 (Komalasari, 2023). Meskipun dalam ini, Duta Uni Eropa di Malaysia berdalih bahwa tidak terkhusus kepada komoditas minyak sawit saja,

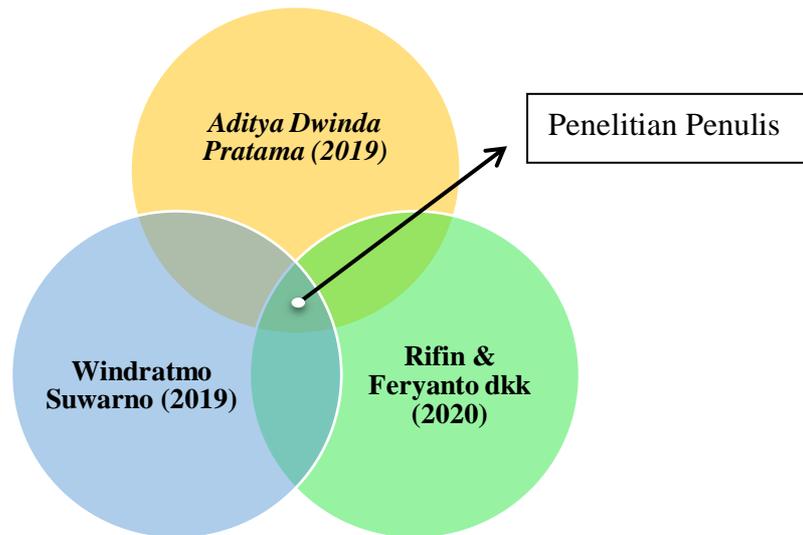
melainkan komoditas sejenis yang berpotensi mengekskalasi aktivitas deforestasi. Namun, nyatanya kebijakan yang baru disahkan tersebut berpotensi menurunkan volume impor sawit dalam beberapa tahun selanjutnya. Atas pernyataan pemerintah Malaysia tersebut, pemerintah Indonesia merespon dengan melihat opsi untuk memblokir komoditas ekspor tersebut ke pasar Eropa sebagai salah satu opsinya dan melihat opsi-opsi lainnya. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan sepakat untuk memerangi diskriminasi kelapa sawit dan memperkuat kerjasama melalui *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) (CNN indonesia, 2023). Selain itu, dari sisi aktor non-pemerintah, Tofan Mahdi, selaku Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan *General Manager Public Relation* PT Astra Agro Lestari Tbk., mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia harus selalu kompak dalam menghadapi kampanye negatif diskriminasi terhadap minyak sawit dalam perdagangan minyak nabati global (Wartaekonomi, 2023). Dari Malaysia, Dr. Ahmad Parveez Ghulam Kadir, selaku General Director dari *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB) menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia perlu melakukan strategi pembatasan kelapa sawit ekspor kepada Uni Eropa untuk memberikan tekanan pada rantai pasok supaya Uni Eropa lebih rasional dan adil dalam bertindak (Bernama, 2023)

Penulis melihat adanya korelasi positif antara pernyataan Malaysia dan Indonesia dalam konteks diskriminasi komoditas kelapa sawit oleh Uni Eropa. Pernyataan yang keluar dari dua negara (baik dari aktor negara maupun non-negara) tersebut merupakan respon terhadap kebijakan UU Anti Deforestasi UE yang baru disahkan Desember 2022 lalu. Kemunculan respon oleh kedua negara yang dalam hal ini adalah Indonesia-Malaysia pada dasarnya muncul sebagai akibat dari kebijakan Uni Eropa dalam membatasi komoditas tertentu, khususnya kelapa sawit dari negara-negara produsen yang berpotensi merugikan secara ekonomi-politik kedepannya. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut terhadap wacana-wacana yang beredar dari kedua negara tersebut supaya dapat membongkar fakta-fakta atau informasi-informasi lainnya yang tercantum di dalam wacana-wacana tersebut serta beberapa hal yang mendasarinya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk kepada analisis wacana

kritis. Analisis wacana kritis merupakan salah satu metode yang bersumber pada teori kritis mazhab Frankfurt, Jerman. Analisis wacana kritis menekankan pada wacana yang telah disertai oleh konteks sosial, sejarah, dan kekuasaan yang menyertainya. Berbeda dengan analisis wacana berdasarkan pada paham Positivisme. Analisis wacana kritis tidak hanya melihat teks semata, melainkan hendak mengeksplorasi makna dan fakta sebenarnya yang terjadi dan memicu munculnya wacana tersebut. Fakta tersebut juga dipengaruhi oleh praktik-praktik sosial yang telah terjadi sebelumnya. Selain itu dari wacana tersebut, dapat dilihat kemudian terkait langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh kedua pihak (Indonesia-Malaysia) kedepannya baik dari aktor negara dan non-negara (perusahaan produsen kelapa sawit). Dengan demikian, penggunaan analisis wacana kritis sebagai instrumen analisis dinilai relevan untuk mengeksplorasi sebuah wacana yang beredar.

1.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menelusuri dan melakukan pemetaan terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan yang relevan terhadap penelitian ini. Penulis mengurai penelitian-penelitian terdahulu dalam rangka untuk merekonstruksi fakta-fakta sebelumnya dan fakta-fakta terbaru dengan menyajikan perbandingan antarpenelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, hasil dari perbandingan yang penulis lakukan dapat menjadi pijakan awal untuk menemukan aspek kebaharuan (*novelty*) yang ada di dalam penelitian oleh penulis. Penelitian terdahulu juga menjadi referensi penulis dalam penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu:



Gambar 1. Komparasi Penelitian Terdahulu

I. *Post Truth* Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit (Aditya Dwindia Pratama, 2019)

Penelitian berupa *paper* yang ditulis oleh Aditya Dwindia Pratama (2019) ini berjudul, "*Post Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit*". Penelitian tersebut berbicara tentang perseteruan antara Indonesia-Uni Eropa mengenai kelapa sawit yang telah diinisiasi oleh boikot komoditas sawit oleh Uni Eropa. Indonesia sebagai salah satu perusahaan terbesar sawit merasa bahwa pemboikotan sawit ini kehilangan pasar. Uni Eropa melakukan pemboikotan sawit karena tidak sesuai dengan komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) tentang poin pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Produksi sawit dinilai cenderung memberikan efek negatif berupa perusakan lingkungan. Indonesia kemudian melakukan gugatan atas perlakuan tersebut ke *World Trade Organization* (WTO). Indonesia juga mempertanyakan komitmen Uni Eropa terhadap salah satu poin SDGs, yaitu memberantas kemiskinan yang sedang diusahakan oleh pemerintah Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan kebenaran dari pembelaan dari masing-masing pihak menggunakan teori *post truth*, *trade off theory*, dan *national theory*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif

dengan teknik pengambilan data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan masing-masing yang diupayakan untuk dapat terwujud dan kepentingan tersebut bersebrangan. Akhirnya timbul adanya kontradiksi, sehingga sampai saat ini masih ditemui sengketa mengenai sawit. Hal ini tidak mengherankan mengingat pada zaman modern, terutama pada era *post truth*, kebenaran-kebenaran yang dimunculkan oleh masing-masing pihak dapat dikritisi lebih lanjut dalam rangka menemukan kebenaran yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Sebagai contoh, kaum aktivis lingkungan dapat saja menjadi salah satu pihak yang mendukung kebijakan Uni Eropa mengenai boikot sawit karena landasan anti-deforestasi. Sedangkan, kaum nasionalis Indonesia mendukung pemerintah karena kepentingan nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Kedua argumen yang dilontarkan seakan bersebarangan, namun sesungguhnya memiliki titik temu. Adapun titik temu tersebut adalah berjalannya industri kelapa sawit yang ramah lingkungan dan ramah sosial bukan dengan pemboikotan atau pengurangan karena justru memunculkan permasalahan lain.

Penelitian ini memberikan inspirasi kepada penulis dalam hal mendeskonstruksi informasi-informasi yang beredar di media sosial untuk ditinjau lebih lanjut. Penulis menjadikan penelitian ini sebagai salah satu sumber penting dalam melihat dua perspektif yang sedang bersengketa dalam isu perdagangan sawit.

II. Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia (Windratmo Suwarno, 2019)

Penelitian berupa *paper* yang ditulis oleh Windratmo Suwarno (2019) ini berjudul, "*Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia*". Penelitian ini membahas terkait diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespon diskriminasi komoditas sawit oleh Uni Eropa. Dipicu oleh dikeluarkannya Resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai sawit dan

deforestasi hutan hujan. Parlemen Uni Eropa dalam hal ini mengesahkan dokumen *Delegated Regulation No. C (2019) 2055 Final on High and Low ILUC Risk Criteria on Biofuels*. Pengesahan dokumen tersebut dinilai telah mendiskriminasi komoditas kelapa sawit dan sarat akan kepentingan ekonomi-politik (persaingan bisnis dan penguasaan komoditas global). Pasalnya, produksi minyak sawit di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan internasional yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga diperlukan diplomasi ekonomi secara regional maupun multilateral dalam rangka memberikan penjelasan dan penyelesaian atas sengketa tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia dalam menghadapi diskriminasi oleh Uni Eropa tersebut. Adapun teori yang digunakan adalah teori diplomasi ekonomi. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif-deksriptif yang menekankan pada penjelasan dan uraian non-analitik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan negosiasi persetujuan mitra ekonomi komprehensif. Sempat melalui beberapa kali penundaan negosiasi, namun ujung dari negosiasi tersebut adalah Uni Eropa akan merevisi kembali RED pada 2021 atau 2023 dengan masih mempertimbangkan sawit sebagai salah satu bahan baku *biofuel*, namun dengan sarat pengembangan industri sawit yang lebih berkelanjutan di Indonesia (ramah lingkungan). Selain itu, dari perdagangan internasional, diplomasi ekonomi Indonesia membuahkan kemenangan ke WTO atas pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) produk biodiesel asal Indonesia pada 2017. Hasil akhirnya adalah WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa. Dengan kemenangan yang dimiliki tersebut, pasar biodiesel di Eropa kembali pulih. Upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia tersebut dapat dikatakan berhasil dan menekan UE untuk mulai mempertimbangkan kembali penghapusan minyak bagi bahan dasar *biofuel*.

Penelitian ini memberikan penulis inspirasi terkait langkah-langkah *soft diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia untuk menekan pemboikotan sawit oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dengan pendekatan diplomasi ekonomi.

Penelitian ini juga memberikan deskripsi secara khusus mengenai motif dilakukannya diplomasi ekonomi yang berujung kepada kemenangan Indonesia dan langkah yang tepat dalam menyelesaikan salah satu masalah dalam sengketa sawit ini.

III. *Assesing the Impact of Limiting Indonesian Palm Oil Exports to the European Union (Rifin & Feryanto dkk, 2020)*

Penelitian berupa *paper* yang ditulis oleh Amzul Rifin, Feryanto, Herawati, dan Harianto (2020) ini berjudul, "*Assesing the Impact of the Limiting Indonesian Palm Oil Exports to the European Union*". Penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pembatasan ekspor komoditas kelapa sawit Indonesia ke pasar Eropa yang diukur menggunakan model *Global Trade Analysis Project (GTAP)* dengan beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, GDP, kesejahteraan secara makro, dan ekspor-impor Indonesia dengan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kuantitatif (*mix-method*) dengan pendekatan deskriptif-analitik.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Uni Eropa untuk melakukan pembatasan terhadap komoditas kelapa sawit dari Indonesia tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi makro di Indonesia. Pasalnya, total ekspor komoditas sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa hanya berkisar 10-14% dari total keseluruhan ekspor sawit dunia yang masuk ke Uni Eropa. Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa jika Uni Eropa melakukan pembatasan 100% terhadap komoditas ekspor sawit (dan produk turunannya) Indonesia, hal ini hanya berdampak pada pengurangan jumlah volume yang diekspor sebesar 4,79%. Dari sisi penggunaan lahan sawit akan berkurang sebesar 2,33%. Sedangkan, dari sisi harga akan berkurang sebesar 0,1%. Dari indikator jumlah buruh yang tidak berpengalaman akan berkurang sebesar 4,86% dan dari sisi jumlah buruh berpengalaman akan berkurang sebesar 4,82%. Adapun angka ini masih dikatakan masih relatif rendah dan tidak terlalu menimbulkan instabilitas ekonomi makro Indonesia maupun secara industri (secara nasional),

melainkan hanya berdampak kecil pada industri sawit rumahan secara singkat (*short-term*). Namun, meskipun demikian dampak ini sedikit mengurangi jumlah ekspor dan pendapatan potensial yang harusnya didapatkan.

Penelitian ini memberikan penulis inspirasi mengenai bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencari jalan tengah terhadap sengketa komoditas sawit tersebut dijalankan harus berdasarkan pada data riil dan saintifik. Assesment yang dilakukan tersebut ternyata memberikan gambaran bahwa pemerintah Indonesia seharusnya "tidak terlalu" khawatir apabila volume ekspor komoditas sawit ke pasar Eropa berkurang dari tahun ke tahun mengingat dampak tersebut tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi makro di Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, terdapat persamaan, perbedaan, serta aspek kebaharuan yang penulis temukan di dalam penelitian yang penulis lakukan. Adapun dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, penulis menemukan persamaan, yaitu adanya tema besar yang sama mengenai diskriminasi komoditas kelapa sawit oleh Uni Eropa yang menyangkut Indonesia-Malaysia dan negara-negara produsen sawit lainnya, meskipun yang menjadi fokus utama adalah Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan antarteliga penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

- (1) Aktor utama yang terlibat dan menjadi unit analisis adalah aktor negara: Indonesia-Malaysia dan aktor non-negara: perusahaan sawit Indonesia dan Malaysia; Sedangkan untuk penelitian terdahulu menggunakan aktor Indonesia, dan organisasi internasional (WTO & Uni Eropa).
- (2) Teori yang digunakan oleh penulis adalah paradigma kritis dan teori analisis wacana kritis dengan indikator tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Sedangkan, teori yang digunakan oleh penelitian terdahulu berturut-turut adalah (a) *post truth-trade off-national theory*, (b) diplomasi ekonomi, dan (c) *Global Trade Analysis Project*;
- (3) Periode yang digunakan di dalam penelitian penulis adalah tahun 2023, sedangkan pada penelitian terdahulu untuk periodenya dari tahun 2016-2019.

- (4) Lebih berfokus kepada pernyataan Indonesia-Malaysia (baik aktor negara maupun non-negara/perusahaan sawit) terhadap diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa setelah disahkannya UU-Anti Deforestasi pada 2022.

Adapun dalam hal ini, konteks kebaruan terletak pada penggunaan teori analisis wacana kritis sebagai pisau analisis dalam rangka untuk mengetahui kebenaran-kebenaran 'murni' dari fenomena yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan fakta-fakta yang lebih spesifik untuk menggambarkan kembali (*re-construct*) fenomena internasional yang terjadi dengan data-data terbaru. Analisis yang dilakukan oleh penulis relatif lebih mendalam karena mencoba untuk mendekonstruksi pernyataan yang tidak muncul dari ruang hampa kemudian merekonstruksinya kembali. Dengan kata lain, masing-masing aktor memiliki alasan dan landasan materialistik-historikal-dialektis di dalam setiap pernyataan yang disampaikan. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi salah satu pilar yang mendukung *output* dari penelitian yang penulis lakukan.

1.3 Rumusan Masalah

Diskriminasi komoditas sawit oleh Uni Eropa berbuah pada sengketa komoditas sawit oleh negara-negara produsen sawit, terutama Indonesia-Malaysia. Pada bulan Desember 2022, Uni Eropa menyetujui pemberlakuan aturan terbaru yang melarang jual-beli minyak kelapa sawit dan/atau komoditas lain yang sejenis yang mengakibatkan aktivitas deforestasi melalui UU Anti-Deforestasi Uni Eropa. Adapun jual-beli minyak sawit di pasar Eropa dapat berlaku apabila para importir dapat membuktikan bahwa produksi mereka tidak mengakibatkan adanya deforestasi. Hal ini membuat para importir minyak sawit geram dengan keputusan Uni Eropa tersebut, khususnya Indonesia-Malaysia, mengingat dua negara tersebut merupakan importir terbesar pada komoditas minyak sawit di pasar Eropa. Pemerintah Malaysia kemudian mengajak pemerintah Indonesia untuk melakukan pemberhentian ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa sebagai respon atas kebijakan peraturan deforestasi tersebut

melalui pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof pada Januari 2023. Meskipun dalam ini, Duta Uni Eropa di Malaysia berdalih bahwa tidak terkhusus kepada komoditas minyak sawit saja, melainkan komoditas sejenis yang berpotensi mengekskalasi aktivitas deforestasi. Namun, nyatanya kebijakan yang baru disahkan tersebut berpotensi menurunkan volume impor sawit dalam beberapa tahun selanjutnya. Atas pernyataan pemerintah Malaysia tersebut, pemerintah Indonesia merespon dengan melihat opsi untuk memblokir komoditas ekspor tersebut ke pasar Eropa sebagai salah satu opsinya dan melihat opsi-opsi lainnya. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan sepakat untuk memerangi diskriminasi kelapa sawit dan memperkuat kerjasama melalui *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Selain itu, dari sisi aktor non-negara dari Indonesia dan Malaysia, yaitu Tofan Mahdi dan Dr Ahmad Parveez menyatakan hal yang sama dalam menekan rantai pasok kelapa sawit ke Uni Eropa supaya lebih rasional dan adil.

Penulis melihat adanya korelasi positif antara pernyataan Malaysia dan Indonesia dalam konteks diskriminasi komoditas kelapa sawit oleh Uni Eropa. Pernyataan yang keluar dari dua negara tersebut merupakan respon atas kebijakan UU Anti Deforestasi UE yang baru disahkan Desember 2022 lalu. Kemunculan respon oleh kedua negara tersebut seolah-olah mewakili negara-negara eksportir lainnya yang tergabung pada CPOPC. Oleh karena itu, berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian ini perlu untuk membahas mengenai motif yang melatarbelakangi pernyataan yang muncul dari Indonesia-Malaysia baik dari kalangan aktor negara maupun aktor non-negara dalam merespon kebijakan Anti-Deforestasi oleh Uni Eropa.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah, pemetaan dan penjelasan penelitian terdahulu, penulis membuat pertanyaan penelitian tersebut sebagai berikut: *“Bagaimana analisis wacana kritis terhadap pernyataan Indonesia dan Malaysia dalam melawan diskriminasi komoditas minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa pada tahun 2023?”*

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi motif dan unsur atau indikator wacana yang terdiri dari tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi) dari pernyataan dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh aktor negara Indonesia-Malaysia dan aktor non-negara perusahaan sawit Indonesia-Malaysia pada 2023 dalam merespon kebijakan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa yang disahkan pada Desember 2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mendesiminasi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada keilmuan hubungan internasional dan komunikasi politik. Adapun secara rinci dijelaskan pada poin-poin berikut:

- **Manfaat Teoritis**
 - Bagi mahasiswa Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan perspektif dari kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu Uni Eropa dan negara-negara produsen sawit terkhususnya Indonesia-Malaysia dan beberapa perusahaan sawit berikut penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan.
 - Bagi pemerintah, laporan penelitian ini memberikan perspektif terkait bagaimana solusi jalan tengah yang harus ditempuh dalam diplomasi ekonomi diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa.
- **Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan bagi aktor – aktor Politik baik negara maupun Organisasi Internasional dalam menyikapi suatu konflik atau kasus sejenis dengan topik penelitian ini.

1.7 Sistematika penulisan

Penulisan penelitian ini dilakukan secara sistematis dan menggunakan kerangka ilmiah. Perlu diketahui, penelitian ini menggunakan beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, bab pertama akan membahas terkait pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, komparasi penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori maupun penjelasan umum mengenai topik yang dibahas dalam penelitian. Pada bab ini, penulis membagi pembahasan kajian teori dengan beberapa bagian, yaitu: Teori kritis (*critical theory*) sebagai payung teorinya dan analisis wacana kritis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai metodologi penelitian, yang mana metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data informasi terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini juga memberikan informasi tentang metode penelitian, jenis penelitian, dan teknik pengumpulan data, teknik analisa data, sumber data, serta pengujian keabsahan yang dilakukan untuk penelitian. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik yang penulis dapatkan dari berbagai sumber studi pustaka.

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini merupakan bagian yang menampilkan hasil serta analisis data yang telah didapat melalui pembahasan. Penulis akan menganalisis dengan eksplorasi teoritis sesuai dengan data yang telah penulis dapatkan dengan sumber data sekunder (studi pustaka).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini, penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan intisari dari hasil yang didapatkan dari analisis terhadap data-data yang diperoleh. Selain itu,

bab ini juga menjelaskan mengenai saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini supaya dapat menjadi penanda bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis mengkaji beberapa konsep teori yang relevan untuk penulis gunakan di dalam penelitian ini. Adapun beberapa teori yang relevan di dalam penelitian ini antara lain teori kritis dan teori analisis wacana kritis. Selain itu, di dalam bagian ini juga dipaparkan mengenai alur berpikir penelitian dalam rangka memberikan gambaran visual terkait alur penelitian itu sendiri. Teori kritis dan teori analisis wacana kritis disampaikan dengan konteks penelitian ini yang berjudul, "*Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Indonesia dan Malaysia Dalam Melawan Diskriminasi Komoditas Kelapa Sawit oleh Uni Eropa Tahun 2023*". Teori-teori ini dirasa relevan karena mampu mendekonstruksi sampai ke akar permasalahannya, sehingga mampu mengetahui *sequences pattern* pernyataan tersebut berulang kali diucapkan. Selain itu, teori ini juga memberikan gambaran bahwa pernyataan oleh para aktor tersebut tidak muncul dari ruang hampa dan hanya sebatas pernyataan belaka, namun terdapat nuansa materialis-historis-dialektis yang menaunginya. Beberapa teori tersebut membantu penulis dalam menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun untuk penjelasan rincinya dapat diperhatikan melalui penjelasan pada subbab-subbab berikut.

2.1 Teori Kritis (*Critical Theory*)

Teori kritis merupakan salah satu teori yang berkembang di kalangan mahzab Frankfurt, Jerman. Teori kritis merupakan teori yang berusaha untuk memajukan emansipasi dan kebebasan manusia dari urusan global. Teori ini mengkritik konstelasi sosial dengan berusaha untuk melacak bentuk-bentuk enklusi yang menghasut baik redistribusi dan perjuangan pengakuan, serta mengidentikasi potensi untuk perubahan progresif yang terinspirasi dari ide-ide yang imanen, norma, dan praksis (Ferreira, 2017). Gagasan tersebut muncul dari karya Immanuel Kant dan Karl Marx yang pada abad ke 18-19 mengajukan gagasan revolusioner mengenai dunia. Teori Kritis berangkat untuk mengkritik praktik institusi sosial yang represif di dunia dan sangat memajukan emansipasi

dengan mendukung gagasan dan praktik yang memenuhi prinsip-prinsip universal. Teori kritis juga menyajikan ide-ide dan praktik alternatif dengan mendasar pada produksi sejarah yang melatar-belakanginya (Ferreira, 2017). Pada era Karl Marx, bentuk turunan teori kritis adalah istilah *Materialisme-Dialektika-Historis* yang saat ini banyak digunakan oleh peneliti sosial untuk mengungkap kebenaran sejarah dari suatu peristiwa. Munculnya sebuah fenomena sosial saat ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan material yang dialektis dan historis. Bagi Karl Marx, sebuah fenomena sosial tidak muncul dari ruang hampa. Fenomena sosial adalah bentuk produksi sejarah yang diikuti oleh proses dialektika material yang saling terhubung (*inter-connectedness*). Baik yang muncul dari interaksi sosial maupun dari produksi teks.

Seperti yang diketahui, Immanuel Kant dan Karl Marx bukanlah ahli Hubungan Internasional. Tentu saja teori-teori yang dikembangkan sebelumnya bukan menyangkut terkhusus perihal Hubungan Internasional (HI). Namun, teori-teori tersebut dikembangkan oleh para ahli HI untuk melacak fenomena sosial internasional saat ini dengan produksi sejarah yang melatarbelakanginya. Saat ini, di dunia terdapat dua arus utama yang menjadi turunan teori kritis ini dalam kerangka perjuangan kelas, yaitu: (1) Paradigma Produksi yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci dan (2) Paradigma Komunikasi yang dipelopori oleh Jurgen Habermas. Paradigma produksi mengacu kepada pola ekonomi yang terlibat di dalam proses produksi barang dan hubungannya terhadap sosial-politik (Cox, 1981). Sedangkan, pada paradigma komunikasi mengacu kepada pola rasionalitas yang terjadi dalam komunikasi antarmanusia dan prinsip-prinsip etika yang diemban (Fraser, 1995). Kedua konsep ini meskipun terlihat berbeda dari segi subjek, namun berasal dari muara prinsip yang sama, yaitu terkait prinsip emansipasi untuk mengkritik realitas sosial. Makna emansipasi juga dapat dimaksudkan kepada usaha untuk menghilangkan ketimpangan atau ketidaksetaraan hubungan sosial-politik dan ekonomi yang terjadi di dunia.

Selain dua arus utama yang menjadi turunan dari teori kritis tersebut dalam pengembangannya, terdapat arus alternatif dari teori kritis (*critical theory*) yang berfokus pada eksplorasi wacana-wacana oleh kekuasaan dalam kerangka kritis, yaitu paradigma kritis. Dalam hal ini, wacana tidak dipandang sebagai

sebuah teks kata semata, melainkan sesuatu yang diproduksi/memproduksi sesuatu yang lainnya baik itu ide, gagasan, atau praksis tertentu. Paradigma kritis ini muncul seiring dengan propaganda media yang dilakukan oleh penguasa dengan tujuan untuk mengendalikan pikiran dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebenaran tertentu, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap cara berfikir dan tindakan masyarakat (Roger, 1994). Salah satu konsep paradigma kritis terhadap wacana yang terkenal adalah dari Michael Foucault. Bagi Foucault, realitas dipahami sebagai sebuah konstruksi yang dibentuk melalui sebuah wacana. Terdapat kekuatan-kekuatan tertentu yang ada di masyarakat yang memobilisasi adanya kontrol komunikasi atau wacana. Kekuatan yang mampu mengontrol komunikasi tersebut dimiliki oleh kelompok dominan (Japarudin, 2016). Kelompok dominan inilah yang sering dianggap sebagai bagian dari kekuasaan. Kekuasaan dalam pandangan Foucault disalurkan ke dalam hubungan sosial dimana ia dapat memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi perilaku sebagai baik atau buruk dan sebagai bentuk pengendalian terhadap perilaku. Kekuasaan juga teraktualisasi melalui pengetahuan dan selalu memiliki efek pada kekuasaan itu sendiri. Menurut Foucault, penyelenggara kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan dan wacana sebagai basis dari kekuasaannya (Foucault, 1984). Dengan kata lain, kekuasaan erat kaitannya dengan wacana dan pengetahuan. Hal ini berimplikasi pada konteks kebenaran yang berlaku di masyarakat oleh kekuasaan tertentu. Kebenaran menjadi subjektif dan bergantung kepada kebenaran kolektif yang berlaku dan mayoritas dianut. Sehingga, tidak ada baginya kebenaran absolut. Dalam hal ini, Foucault berusaha mengajak untuk mendeskonstruksi dengan mengkritisi kembali kebenaran-kebenaran yang muncul dalam realitas sosial melalui sebuah wacana-wacana yang beredar mengingat adanya asumsi awal bahwa realitas sosial yang terbentuk akibat adanya intervensi kekuasaan (Japarudin, 2016). Hal ini dikarenakan perlunya untuk mendapatkan kebenaran yang mendekati "murni" guna memperoleh sudut pandang alternatif dari suatu fenomena.

2.2 Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis merupakan salah satu metode yang bersumber dari paradigma kritis. Metode ini merupakan metode baru yang digunakan di dalam penelitian disiplin ilmu sosial dan budaya (Hariyatmoko, 2017). Analisis wacana kritis muncul dari sinkretisasi berbagai disiplin keilmuan, seperti analisis wacana, psikologi, sejarah, linguistik, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dalam analisis wacana kritis, teks bukan sesuatu yang bermakna literal saja (apa adanya), melainkan terdapat konteks sosial yang menyertainya. Wacana yang termaktub di dalam sebuah teks dipengaruhi dan mempengaruhi konteks sosial. Hubungan ini kerap didefinisikan sebagai hubungan *feedback-loop* atau hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Senada dengan yang disampaikan oleh Fairclough (1989) bahwa wacana adalah bentuk "praktik sosial" yang berimplikasi pada dialektika antara bahasa dan kondisi sosial.

Analisis wacana dalam pandangan kritis lebih menekankan pada konstelasi kekuasaan yang terjadi pada proses produksi dan re-produksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang dapat memiliki penafsiran tertentu secara bebas karena sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang menyertainya dan/atau di sekitarnya (Fairclough, 1989). Implikasi dari pernyataan tersebut adalah analisis wacana kritis mencoba untuk mengkritik analisis wacana deskriptif yang memandang suatu wacana hanyalah teks bahasa semata. Selain itu, dalam pandangan analisis wacana kritis, teks adalah bentuk linguistik yang bersifat sosial, yaitu tidak melepaskan dirinya pada pengaruh lingkungan sosialnya karena teks adalah wujud dari ekspresi atau refleksi dari praktik-praktik sosial. Analisis wacana kritis hendak mengungkap bahasa yang digunakan dalam pernyataan untuk melihat ketidakadilan kekuasaan yang ada (Masitoh, 2020).

Adapun menurut Van Dijk (1993) memiliki pendapat terkait karakteristik penting di dalam analisis wacana kritis, yaitu: (1) tindakan, (2) konteks, (3) histori, (4) kekuasaan, dan (5) ideologi. Adapun secara detail dijelaskan melalui penjelasan berikut (Dijk, 1993):

1. Tindakan

Tindakan merupakan karakter utama di dalam analisis wacana kritis. Hal ini berarti bahwa pihak yang berwacana mengungkapkan maksud dan tujuannya melalui bahasa dalam rangka untuk mempengaruhi, memberitahu, membujuk, memerintah, dan mengikuti apa yang menjadi keinginannya, sehingga bersifat persuasif.

2. Konteks

Selain tindakan, karakteristik lain yang penting untuk diketahui adalah konteks. Seperti yang diketahui sebelumnya, teks dalam wacana kritis tidak hanya dipandang sebagai teks, melainkan terdapat konteks yang menaunginya. Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks yang berada pada situasi dan kondisi sosial tertentu. Konteks terbagi menjadi dua, yaitu: (1) jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnik, dan agama; (2) Tempat, waktu, posisi pembicara, atau lingkungan fisik. Konteks dalam hal ini dapat dimaknai sebagai konteks situasi, latarbelakang pengetahuan, dan latar belakang dari tokoh yang memunculkan wacana tersebut. Konteks yang dimaksud juga dapat disertakan oleh histori, kekuasaan, dan ideologi.

3. Histori

Selain daripada aspek tindakan dan konteks, terdapat aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam analisis wacana kritis, yaitu aspek historis. Aspek historis lebih menekankan kepada elemen historis yang menaungi wacana tersebut, seperti mengapa dan bagaimana wacana tersebut dapat terbentuk. Kemudian, bagaimana wacana tersebut diproduksi oleh fakta-fakta yang *interconnected* yang berdialektika membentuk wacana.

4. Kekuasaan

Karakteristik kekuasaan lebih merupakan pada koneksi antara wacana dengan masyarakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, analisis

wacana kritis tidak berhenti hanya pada teks, melainkan adanya hubungan kekuasaan dan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya tertentu. Wacana dapat berfungsi dari instrumen kontrol masyarakat oleh kekuasaan, sehingga wacana adalah sama sekali bukan sesuatu yang netral. Melainkan memiliki interkoneksi dengan kekuasaan. Dalam perihal lain, wacana dapat menjadi momentum bertemunya dua kekuasaan yang hendak meraih "pasar suara" masyarakat.

5. Ideologi

Dalam studi analisis wacana kritis, aspek ideologi merupakan episentrum utama. Ideologi dipandang sebagai sebuah "ruh" dalam setiap tulisan, ujaran, pernyataan, maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi wacana. Ideologi didesiminasi melalui tulisan dan berbagai media yang memungkinkan ideologi tersebut dapat dipahami dan bahkan dianut oleh masyarakat. Ideologi merupakan instrumen untuk melihat representasi realita. Realita yang terbentuk bergantung pada kompleksitas dan keteraturan ideologi itu sendiri. Dalam konteks wacana kritis, ideologi mendominasi setiap wacana dan akan sangat bergantung kepada siapa produsen wacana. Setiap wacana yang bertentangan memiliki konteks ideologi yang berbeda. Pertentangan wacana tersebut bukanlah hal yang rumit untuk diamati, melainkan ujungnya adalah menjadi identitas pada 'posisi' mana wacana tersebut berada.

Dalam studi wacana kritis, objek studi bukan hanya teks melainkan karakteristik yang telah disebutkan di atas. Tujuan dari analisis wacana kritis adalah untuk memecah bentuk kesamaran di dalam sebuah wacana yang diproduksi. Terdapat beberapa pendekatan yang dominan digunakan dalam praktik analisis wacana kritis, yaitu pendekatan yang dikemukakan oleh: (1) Fairclough (*Dialectical-Relational Approach (DRA)*), (2) Theo Van Leeuwen (*Social-Actors Approach (SAA)*), dan (3) Teun A. Van Dijk (*Socio-Cognitive Approach (SCA)*). Berikut adalah tabel perbandingan analisis wacana kritis dengan tiga pendekatan di atas (Masitoh, 2020):

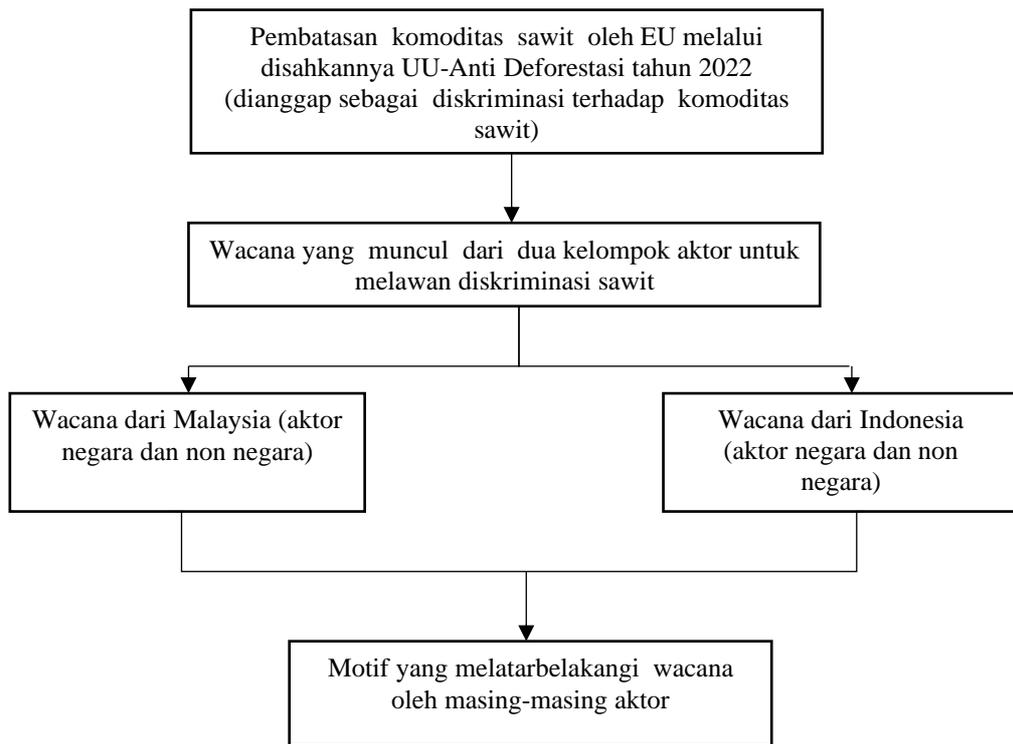
Tabel 2. Perbandingan Pendekatan Analisis Wacana Kritis (Sumber: Masitoh, 2020)

KETERANGAN	Fairclough (<i>Dialectical-Relational Approach</i>)	Theo Van Leeuwen (<i>Social-Actors Approach</i>)	Teun A. Van Dijk (<i>Socio-Cognitive Approach</i>)
Konsep umum	Wacana diproduksi dari praktik sosial dan mempengaruhi tatanan sosial. Dalam hal lain, Wacana juga dapat dibentuk oleh tatanan sosial yang meliputi pengetahuan, hubungan sosial, dan identitas sosial.	Aktor sosial atau orang atau kelompok mendominasi lebih dan memegang kendali atas posisinya dibanding kelompok atau aktor sosial lainnya melalui wacana.	Wacana yang muncul dilihat dari bagaimana wacana atau teks tersebut diproduksi sehingga diperoleh suatu pengetahuan mengapa dapat diperoleh teks tersebut
Definisi sederhana	Praktik sosial mempengaruhi wacana dan sebaliknya (<i>Feedback loop</i>)	Aktor sosial dan kelompok sosial dimunculkan atau tidak melalui wacana (<i>Inclusion and exclusion process</i>).	Wacana dibedah menggunakan tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dan ketiga dimensi tersebut digabungkan dalam satu kesatuan.
Keterangan lain	Menggunakan pandangan <i>helicopter view</i> dan bersifat lebih generalis	Memfokuskan dirinya pada kemunculan atau ketidakmunculan aktor sosial yang menjadi 'pabrik' wacana.	Menggabungkan ketiga dimensi dalam wacana dengan keterangan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Teks yang dimaksud merujuk pada struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk memperjelas tema - Kognisi sosial merujuk kepada pengetahuan yang melekat pada wacana yang dikeluarkan oleh individu terkait dalam pewartaan. - Konteks sosial merujuk kepada konteks individu dan setting sosial, kekuasaan, historis, dan ideologis)

Berdasarkan pada komparasi yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan oleh Van Dijk dalam melakukan analisis wacana kritis. Hal ini didasarkan kepada kelebihan pendekatan oleh Van Dijk jika dibandingkan dengan pendekatan analisis wacana kritis yang lain. Pendekatan Van Dijk lebih menekankan pada integrasi antara teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang menyertai wacana tersebut muncul. Produksi atas wacana menjadi penting mengingat dialektika praktik sosial dan keterlibatan aktor yang dimunculkan pun juga sangat mungkin untuk didapatkan. Seperti yang dijelaskan, dalam dimensi teks, proses analisis akan menekankan pada struktur teks yang digunakan dan strategi wacana yang digunakan untuk mempertegas maksud dan tujuan dari wacana tersebut. Dalam hal kognisi sosial, penulis dapat menganalisis proses para pihak yang menyertakan wacana (pewarta) dalam menggapai sebuah pengetahuan tertentu yang pada akhirnya diikutsertakan pada wacana yang diperoleh. Hal ini berkaitan dengan kondisi dari pewarta, nilai dan ideologi yang dianut (Dijk, 1993). Sedangkan, dalam konteks sosial, dapat dijelaskan mengenai konteks latar, kekuasaan, historis, dan ideologi yang dapat melibatkan berbagai elemen kompleks yang membangun wacana tersebut (Dijk, 1993). Dengan demikian, hemat penulis, pendekatan oleh Van Dijk ini relevan dengan penelitian yang penulis lakukan lantaran memiliki kemiripan tujuan untuk membeda bagaimana pernyataan tersebut timbul dalam kognisi dan konteks sosial yang menyertainya. Pendekatan oleh Van Dijk dapat mengeksplorasi dan mengklarifikasi dugaan-dugaan yang kabur dari pihak yang mewartakannya.

2.3 Alur Berpikir

Berdasarkan pada teori-teori di atas, diketahui bahwa sebuah teks tidak hanya dimaknai sebagai kata-kata, melainkan sebuah hasil produksi sebuah praktik-praktik sosial yang dialektis dan terikat oleh kekuasaan, histori, dan ideologi tertentu. Dalam rangka untuk mempermudah penulis melakukan penelitian, penulis menggunakan alur berfikir yang digambarkan melalui diagram berikut:



Gambar 2. Alur Berpikir Penelitian

Berdasarkan pada alur berpikir di atas, dapat dikatakan bahwa penulis memulai dari kondisi sosial yang muncul, yaitu isu mengenai disahkannya UU Anti-Deforestasi oleh EU yang mana mencoba untuk membatasi impor sawit dengan memperketat kriteria jenis minyak kelapa sawit yang masuk (apakah berkaitan erat dengan deforestasi di negara produsen atau tidak). Hal ini dianggap oleh negara-negara produsen sawit, terutama negara-negara produsen sawit terbesar, yaitu Indonesia dan Malaysia sebagai diskriminasi terhadap komoditas sawit dan patut untuk dilawan. Atas dasar kondisi tersebut, aktor negara atau pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta aktor non-negara, yaitu perusahaan sawit Indonesia dan Malaysia memberikan pernyataan untuk mendukung perlawanan terhadap diskriminasi komoditas tersebut. Namun, dalam penelitian ini penulis mencoba mengeksplorasi lebih jauh terkait motif perlawanan tersebut dengan beberapa instrumen yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dengan tingkat kebenaran yang dapat

dipertanggungjawabkan (ilmiah) menggunakan data-data yang penulis dapatkan melalui berbagai sumber.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sebuah cara atau proses yang tepat, sistematis, dan ilmiah (berdasarkan pada fakta riil) untuk mencapai suatu tujuan atau kegunaan tertentu (Sprinz & Nahmias, 2002). Dalam penelitian, metode penelitian digunakan sebagai salah satu cara atau instrumen untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Tujuan utama diadakannya metode penelitian adalah agar proses penemuan jawaban dari suatu masalah dapat ditempuh dengan cara yang lebih teratur dan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Setiap penelitian memiliki rumusan masalah yang berbeda. Sehingga, metode penelitian yang digunakan juga berbeda sesuai dengan konteks masalah yang diteliti. Dalam metode penelitian, terdapat beberapa prosedur yang sistematis yang dilakukan, seperti: (1) pengumpulan data, (2) pengolahan data, (3) penyajian data, dan (4) analisis data (Nugrahani, 2014). Dengan demikian, metode penelitian juga dapat diartikan sebagai sebuah susunan prosedur yang sistematis, empiris, dan rasional untuk menjawab rumusan masalah yang telah diteliti.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan metode kualitatif dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Metode kualitatif ini penulis gunakan sebagai prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, maupun tindakan yang didapat dari pihak-pihak yang diamati (Bogdan & Taylor, 1975). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan fenomena pernyataan respon politik Indonesia-Malaysia terhadap kebijakan Anti-Deforestasi oleh Uni Eropa yang disahkan pada Desember 2022 dengan menggunakan pisau analisis indikator analisis wacana kritis.

3.2 Unit Analisis

Secara sederhana, unit analisis dapat didefinisikan sebagai objek dari penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut menganalisis pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh aktor negara

(Indonesia-Malaysia) dan aktor non-negara (perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia-Malaysia). Adapun unit analisis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Unit Analisis Penelitian

No.	Judul Berita	Tanggal	Pihak yang menyatakan	Jabatan	Kluster	Negara
1	Malaysia Ajak Indonesia Stop Eskpor Sawit (CPO) ke Uni Eropa	12 Januari 2023	Fadillah Yusof	Wakil Perdana Menteri	Pemerintah (Aktor Negara)	Malaysia
2	Indonesia dan Malaysia Perlu Perkuat Kerja Sama Hadapi Diskriminasi Minyak Sawit Eropa	10 Januari 2023	Tofan Mahdi	Ketua Bidang Komunikasi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)	Pengusaha (Aktor Non-Negara)	Indonesia
3	Jokowi dan Anwar Sepakat Perangi Diskriminasi Kelapa Sawit	9 Januari 2023	Joko Widodo	Presiden Republik Indonesia	Pemerintah (Aktor Negara)	Indonesia
4	Indonesia dan Malaysia Kerja Sama Lawan Diskriminasi Sawit	9 Februari 2023	Airlangga Hartanto	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Pemerintah (Aktor Negara)	Indonesia
5	<i>More collaboration between Malaysia, Indonesia to fight palm oil</i>	8 Juni 2023	Anwar Ibrahim	Perdana Menteri Malaysia	Pemerintah (Aktor Negara)	Malaysia

	'discrimination'					
6	<i>Strategy to fight anti-palm oil lobby will pressure EU</i>	15 Januari 2023	Ahmad Parveez Ghulam	Dirjen Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	Aktor Non-Negara	Malaysia

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data oleh penulis dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi dari sumber yang ditemukan melalui internet. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari sumber kedua yang berupa dokumen resmi, artikel, jurnal, maupun dokumen lain yang berkaitan, seperti *paper*, makalah ilmiah, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan data sekunder dapat disebut sebagai studi pustaka.

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir M. , Metode Penelitian, 1988). Teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data-data secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai bacaan atau literatur yang berkaitan dalam rangka menjawab masalah penelitian. Berikut adalah sumber data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini:

Tabel 4. Daftar Sumber Data Sekunder

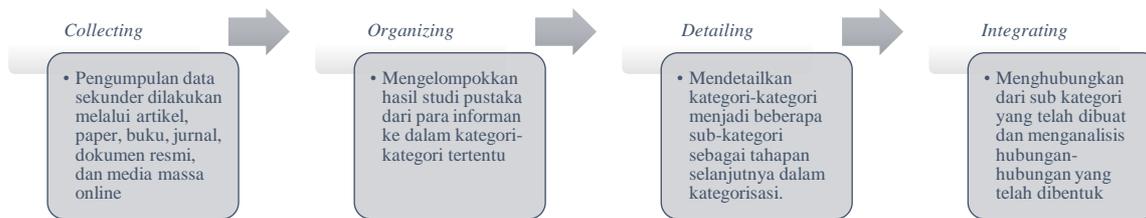
No	Sumber Data	Jenis Data	Tanggal	Sumber
1	Malaysia Ajak Indonesia Stop Eskpor Sawit (CPO) ke Uni Eropa	Sekunder - Berita	12 Januari 2023	https://ekonomi.bisnis.com/read/20230112/12/1617617/malaysia-ajak-indonesia-stop-ekspor-sawit-cpo-ke-uni-eropa
2	Indonesia dan Malaysia Perlu	Sekunder - Berita	10 Januari 2023	https://www.astra-agro.co.id/2023/01/10/indone

No	Sumber Data	Jenis Data	Tanggal	Sumber
	Perkuat Kerja Sama Hadapi Diskriminasi Minyak Sawit Eropa			sia-dan-malaysia-perlu-perkuat-kerja-sama-hadapi-diskriminasi-minyak-sawit-eropa/
3	Jokowi dan Anwar Sepakat Perangi Diskriminasi Kelapa Sawit	Sekunder - Berita	9 Januari 2023	https://www.cnbciindonesia.com/news/20230109120629-4-403935/jokowi-dan-anwar-sepakat-perangi-diskriminasi-kelapa-sawit
4	Indonesia dan Malaysia Kerja Sama Lawan Diskriminasi Sawit	Sekunder - Berita	9 Februari 2023	https://www.liputan6.com/bisnis/read/5202786/indonesia-dan-malaysia-kerja-sama-lawan-diskriminasi-sawit-eropa
5	<i>Indonesia, Malaysia to Send Palm Oil Mission to EU</i>	Sekunder - Berita	11 Februari 2023	https://www.thejakartapost.com/paper/2023/02/11/indonesia-malaysia-to-send-palm-oil-mission-to-eu.html
6	Malaysia Terus Galang Kekuatan Lawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa	Sekunder - Berita	16 Januari 2023	https://www.elaeis.co/berita/baca/malaysia-terus-galang-kekuatan-lawan-diskriminasi-sawit-uni-eropa
7	Menyikapi Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa Pada Minyak Sawit	Sekunder - Jurnal	21 Desember 2022	3.21.-MENYIKAPI-KEBIJAKAN-ANTI-DEFORESTASI-UNI-EROPA-PADA-MINYAK-SAWIT.pdf (palmoilina.asia)
8	<i>Palm Oil Production, Consumption, and Trade Patterns : The Outlook From an EU Perspective</i>	Sekunder - Buku	Juni 2022	https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2022/Palm_oil_production_consumption_and_trade_pattern.pdf
9	<i>The Chain: Bumitama Clarifies Sourcing Policies After Palm Oil from Deforestation-Linked PT Permata Sawit Mandiri Enters Its Mills</i>	Sekunder - Berita	14 Desember 2022	https://chainreactionresearch.com/the-chain-bumitama-clarifies-sourcing-policies-after-palm-oil-from-deforestation-linked-pt-permata-sawit-mandiri-enters-its-mills/
10	<i>Multiple Benefits of The Palm Oil Biodiesel Mandatory</i>	Sekunder – Jurnal	24 November 2021	https://www.researchgate.net/publication/356486516_Environmental_effect_of_biodiesel_mandatory_policy#:~:text=Over%20recent%20years%2C%20biodiesel%20has%20become%20the%20most,e

No	Sumber Data	Jenis Data	Tanggal	Sumber
				missions%20and%20balancing%20supply%20demand%20of%20palm%20oil.
11	<i>Global Greenhouse Gas Emission Data</i>	Sekunder – Website	15 Februari 2023	https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
12	<i>“Deforestation-Free” Policies And It’s Polemic.</i>	Sekunder - Jurnal	15 September 2022	https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2022/09/3.15.-DEFORESTATION-FREE-POLICIES-AND-ITS-POLEMIC.pdf
13	<i>“Deforestation-Free” Policy for Palm Oil Cause Wider Global Deforestation. Palm Oil Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues</i>	Sekunder - Jurnal	19 November 2022	https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2022/11/3.19.-DEFORESTATION-FREE-POLICY-FOR-PALM-OIL-CAUSE-WIDER-GLOBAL-DEFORESTATION.pdf
14	<i>Comparing Recent Deforestation Measures of the United States, European Union, and United Kingdom</i>	Sekunder - Berita	21 Januari 2022	https://www.steptoeglobaltradeblog.com/2022/01/comparing-recent-deforestation-measures-of-the-united-states-european-union-and-united-kingdom/#more-2262

3.4 Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan ketika pengumpulan data telah dilakukan. Penulis kemudian melakukan tahapan pengolahan data, yaitu mereduksi dan mengklasifikan data yang telah didapat. Reduksi dan klasifikasi data sekunder dilakukan dalam rangka untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Kategori-kategori tersebut berdasarkan pada indikator-indikator analisis wacana kritis Van Dijk antara lain tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *coding* sebagai instrumen untuk melakukan kategorisasi terhadap variabel-variabel penelitian. Setelah dilakukan kategorisasi data berdasarkan pada indikator, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data dan analisis terhadap wacana tersebut. Adapun prosesnya dapat dilihat pada diagram berikut (Creswell, 2009):



Gambar 3. Proses Teknik Pengolahan Data

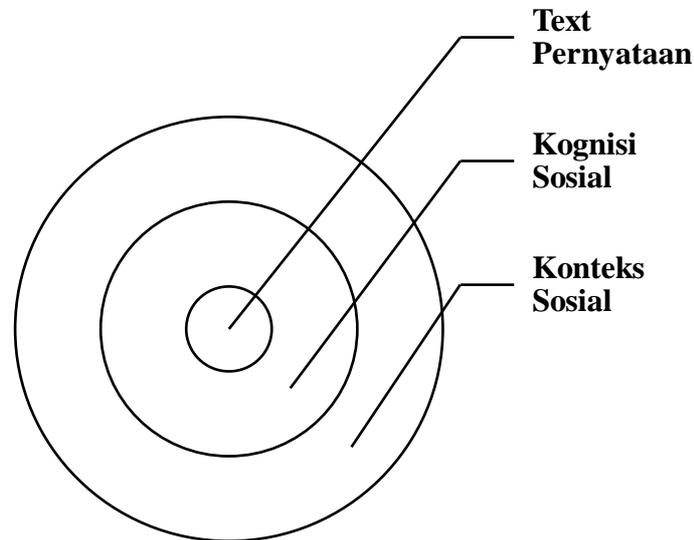
3.5 Teknik Penyajian Data

Setelah pengelompokkan data yang didapat telah dilakukan, tahap selanjutnya yang penulis tempuh adalah penyajian data. Proses penyajian data dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, serta gambaran visual. Dalam tahap penyajian data, selalu diikuti oleh deskripsi terkait analisis variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, penyajian ini didominasi oleh deskripsi, tabel, maupun grafik yang menunjukkan keterkaitan antarvariabel yang ada.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah pengelompokkan dan penyajian data yang didapat diselesaikan, tahap selanjutnya yang penulis tempuh adalah teknik analisis data dalam rangka untuk menemukan korelasi antarvariabel yang diteliti. Dalam penelitian yang penulis lakukan, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Van Dijk. Teknik analisis ini mencoba untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai ucapan dari aktor yang terlibat dengan adanya pelibat kognisi sosial dan konteks sosial yang menaunginya. Menurut Van Dijk, analisis yang dilakukan terhadap suatu teks, tidak boleh berhenti pada teks tersebut saja tanpa mempertimbangkan kognisi dan konteks sosial yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena teks adalah produksi dari suatu realitas sosial yang terbentuk (Sobur, 2001). Selain itu, Van Dijk juga menyebutkan bahwa adanya pengaruh yang ekuivalen antara dominasi oleh kelompok kekuasaan, struktur sosial yang ada, serta kognisi dan kesadaran yang berpengaruh membentuk pesan

atau teks tertentu (Ghafur, 2016). Secara sederhana, model analisis wacana kritis oleh Van Dijk tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 4. Model Analisis Wacana Kritis Van Dijk

3.7 Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah tahapan analisis dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan atau verifikasi terhadap dugaan awal. Kesimpulan yang dimaksud lebih mengacu kepada jawaban atas hasil analisis yang sebelumnya telah dibuat berdasarkan data-data yang telah dikategorisasikan, didetailkan, dan terintegrasi.

3.8 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep adalah salah satu instrumen penelitian yang dapat membantu penulis untuk menavigasi kaitan variabel dan data yang diteliti. Selain itu, operasionalisasi konsep berisi teori serta indikator-indikator yang digunakan sebagai landasan untuk mencari data. Berikut adalah tabel operasionalisasi konsep yang penulis gunakan di dalam penelitian ini:

Tabel 5. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Teori/Konsep	Indikator	Bukti Empirik	Sumber Informasi
Analisis Wacana Kritis (Van Dijk)	Tindakan	Pernyataan yang disampaikan untuk tujuan tertentu	Media massa, <i>paper</i> / jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi
	Konteks	Konteks sosial yang menyertai kemunculan pernyataan tersebut, profil, latarbelakang, dan latar (setting) pada saat pernyataan tersebut disampaikan	Media massa, <i>paper</i> / jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi
	Historis	Sejarah kemunculan yang menyertai pernyataan tersebut	Media massa, <i>paper</i> / jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi
	Kekuasaan	Konteks sosial-politik yang menyertai pernyataan aktor (faktor yang dianggap mempengaruhi upaya wacana yang beredar)	Media massa, <i>paper</i> / jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi
	Ideologi	Ideologi yang terkandung di dalam pernyataan tersebut dan yang hendak dibangun.	Media massa, <i>paper</i> / jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi

BAB IV

ANALISIS

Bab ini menjelaskan keenam objek penelitian yang dianalisis menggunakan lima indikator dari konsep analisis wacana kritis (Van Dijk), antara lain tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Kelima indikator yang disebutkan tersebut membedah wacana yang diproduksi dari sisi-sisi yang berbeda. Indikator tindakan merujuk kepada pernyataan yang disampaikan oleh aktor yang memproduksi wacana dengan maksud dan tujuan tertentu. Indikator konteks merujuk kepada profil, latarbelakang, latar (*setting*) pada saat pernyataan tersebut disampaikan. Indikator historis merujuk kepada sejarah kemunculan pernyataan tersebut serta kondisi sosial yang relevan dengan wacana tersebut. Kemudian indikator kekuasaan merujuk kepada kondisi sosial-politik yang menyertai pernyataan wacana oleh aktor. Pada indikator ini, wacana dapat menjadi instrumen oleh kekuasaan untuk mempengaruhi kelompok atau pihak-pihak tertentu. Selanjutnya adalah indikator ideologi, yaitu perspektif yang terkandung di dalam pernyataan oleh aktor yang memproduksi wacana tersebut. Selain itu, dalam konsep analisis wacana kritis (Van Dijk), terdapat analisis terhadap kognisi sosial dan konteks sosial. Kognisi sosial merujuk kepada pengetahuan yang terkandung di dalam pernyataan yang telah diproduksi oleh aktor. Sedangkan, konteks sosial merujuk kepada kondisi sosial yang terjadi dalam pengembangan atas pernyataan atau wacana yang telah diproduksi. Penjelasan lebih mendetail mengenai analisis, penulis sajikan ke dalam penjelasan di bawah ini.

4.1 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Presiden Indonesia, Jokowi, Untuk Memerangi Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa



Gambar 5. Presiden Joko Widodo Berbincang dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam Pertemuan Bilateral di Istana Bogor Membahas Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa

Sumber: Kompas, 2023

Dalam berita yang disajikan oleh *website* Kompas yang berjudul, “Indonesia-Malaysia Sepakat Perangi Diskriminasi terhadap Kelapa Sawit” pada 9 Januari 2023. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia-Malaysia bersepakat untuk bekerjasama melalui *Council Palm Oil Producing Countries (CPOC)* untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Hal tersebut tertuang di dalam pernyataan Presiden Jokowi berikut (Kompas, 2023):

"Kita juga bersepakat kerja sama melalui Council Palm Oil Producing Countries CPOPC untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit," – Presiden Jokowi

Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia-Malaysia juga akan bekerjasama dalam meningkatkan pasar minyak kelapa sawit. Sebelumnya, Jokowi melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO pada 9 Desember 2019. Gugatan tersebut dilayangkan imbas kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *Delegated Regulation UE* yang menganggap bahwa kebijakan-kebijakan tersebut

dianggap mendiskriminasi komoditas kelapa sawit Indonesia. Gugatan tersebut dilayangkan karena Uni Eropa melalui kebijakan-kebijakannya telah dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Pembatasan tersebut berkonsekuensi pada volume ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa (Kompas, 2020).

Sehubungan dengan konsep analisis wacana kritis Van Dijk, salah satu indikator yang digunakan adalah tindakan. Tindakan merujuk kepada pernyataan dianggap memiliki tujuan tertentu. Dalam tautan berita tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan kesungguhannya untuk mengajak Malaysia memerangi diskriminasi komoditas kelapa sawit yang dilayangkan oleh Uni Eropa beberapa tahun ke belakang melalui kebijakan-kebijakan yang membatasi ekspor kelapa sawit Indonesia-Malaysia yang menyebabkan pasar kelapa sawit di Uni Eropa berkurang volumenya dalam beberapa tahun kebelakang. Salah satu kebijakan terbaru oleh Uni Eropa adalah *Europe Union Deforestation Regulation* (EUDR). Pernyataan Jokowi yang dianggap sebagai sebuah tindakan untuk merespon polemik diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Tindakan tersebut bersifat strategis dan politis. Jokowi menggunakan pernyataan tersebut untuk menggalang dukungan dari dalam dan luar negeri, khususnya Malaysia, untuk sama-sama memerangi diskriminasi sawit. Hal ini merupakan penggambaran tindakan kolektif yang diambil dalam level negara dalam menghadapi kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang bersifat diskriminatif.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia-Malaysia perlu melakukan kerjasama untuk meningkatkan pasar sawit dunia. Hal ini menggambarkan suatu tindakan yang bersifat strategis untuk mulai memetakan kembali potensi pasar sawit alternatif yang belum dieksplorasi oleh kedua negara tersebut. Tindakan tersebut juga memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia tidak ingin bergantung pada pasar Eropa saja dan mulai mencari pasar alternatif dalam rangka menjaga sekaligus meningkatkan neraca volume ekspor kelapa sawitnya. Pernyataan yang dilayangkan oleh Presiden Jokowi tersebut juga mencoba untuk meyakinkan Malaysia bahwa dalam

kurun waktu kedepan, negara-negara produsen kelapa sawit perlu melihat kembali pilihan pasar alternatif selain Uni Eropa (Republika, 2023).

Berdasarkan pada wacana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut, hal ini menunjukkan keseriusan negara-negara produsen sawit terbesar di Dunia, khususnya Indonesia dan Malaysia untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit oleh Uni Eropa. Kata “memerangi” merupakan nomenklatur yang dipilih untuk memberikan sinyal kepada Uni Eropa untuk berhati-hati dan waspada dalam mengeluarkan kebijakan yang berpotensi merugikan negara-negara produsen sawit. Selain itu, nomenklatur tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia telah serius dalam mengambil sikap untuk mempertahankan kelangsungan rantai pasok (*supply chain*) kelapa sawit dalam negeri yang merupakan salah satu kontributor terbesar dalam devisa negara (Paspi, 2024).

Selain itu, pada indikator kedua dalam analisis wacana kritis Van Dijk adalah konteks. Konteks dalam hal ini merujuk kepada profil dan latarbelakang aktor yang menyampaikan serta latar (*setting*) pernyataan tersebut disampaikan. Dalam wacana ini, Presiden Jokowi sebagai aktor dalam wacana memiliki kapabilitas dan tanggungjawab untuk menyatakan sikap terhadap diskriminasi Uni Eropa pada komoditas sawit. Perlu diketahui bahwa pernyataan yang disampaikan merupakan representasi dari negara dalam merespon isu diskriminasi tersebut. Terlebih lagi, isu diskriminasi tersebut menyinggung salah satu komoditas yang menyumbang devisa negara dalam jumlah besar, yaitu kelapa sawit. Selain daripada itu, berkaitan dengan latar (*setting*) pada saat pernyataan tersebut disampaikan, Presiden Jokowi menjalankan sesi wawancara dengan wartawan yang mana ia dengan sadar mengetahui bahwa pernyataan tersebut akan disebarkan ke publik.

Pada indikator ketiga dalam analisis wacana kritis Van Dijk, yaitu historis. Indikator historis merujuk kepada konteks sosial yang menyertai pernyataan tersebut muncul. Perlu diketahui bahwa pernyataan yang muncul tidak datang dari ruang hampa. Terdapat pergerakan peristiwa-peristiwa yang secara dialektis mempengaruhi munculnya pernyataan tersebut. Seperti halnya dalam pernyataan Presiden Jokowi tersebut, persoalan diskriminasi oleh Uni Eropa bukanlah hal

baru. Indonesia dan Malaysia telah lama menghadapi kritik dari berbagai organisasi internasional mengenai dampak produksi kelapa sawit yang merusak lingkungan. Uni Eropa melalui beberapa kajian yang mereka lakukan menghasilkan beberapa kebijakan, seperti RED dan EUDR yang secara langsung membatasi penggunaan kelapa sawit sekaligus membatasi impor kelapa sawit dari Indonesia dan beberapa negara produsen kelapa sawit lainnya karena kelapa sawit yang berasal dari negara tersebut dianggap komoditas yang diproduksi dari aktivitas deforestasi. Telah dilaporkan bahwa semenjak 2018, volume ekspor kelapa sawit Indonesia ke kawasan Uni Eropa terus menyusut (CNBC, 2023). Anggapan dan tindakan pembatasan tersebut merupakan diskriminasi dari Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit dari negara-negara produsen. Sedangkan, yang diketahui, komoditas ini adalah salah satu penyumbang devisa terbesar. Hal inilah yang kemudian mendasari pernyataan Presiden Jokowi tersebut muncul.

Selanjutnya, pada indikator keempat dari konsep analisis wacana kritis Van Dijk adalah kekuasaan. Kekuasaan merujuk kepada aktor atau pihak yang menguasai wacana tersebut. Analisis wacana kritis melihat bahwa kekuasaan mengontrol wacana untuk mempengaruhi kelompok tertentu yang diinginkan. Dalam wacana ini, Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara menggunakan otoritasnya untuk membela kepentingan nasional (*national interest*) dan melindungi industri strategis, seperti kelapa sawit. Pernyataan oleh Presiden Jokowi tersebut mencerminkan upaya untuk menunjukkan kekuatan diplomatik dan solidaritas regional dengan Malaysia. Presiden Jokowi sebagai representasi negara mengajak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk terus memerangi diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa dan mencoba mempengaruhi negara-negara produsen lainnya untuk turut serta memerangi hal tersebut.

Terakhir, pada indikator kelima dari konsep analisis wacana kritis Van Dijk adalah perspektif yang mendasari pernyataan dari aktor yang menyampaikan wacana. Ideologi merupakan bagian fundamental dari sebuah wacana. Pada wacana yang disampaikan, Presiden Jokowi mengatakan bekerjasama dengan Malaysia untuk memerangi diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Dalam wacana ini, mengandung beberapa lapisan ideologi yang mempengaruhi

terbentuknya wacana tersebut. *Pertama*, adalah nasionalisme ekonomi. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi berupaya untuk melindungi industri kelapa sawit yang merupakan salah satu industri strategis bagi perekonomian Indonesia. Dengan mengangkat isu diskriminasi, Presiden Jokowi berusaha memobilisasi dukungan domestik dan menegaskan bahwa pemerintah akan berdiri melawan kebijakan internasional yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Hal tersebut mencerminkan bahwa negara harus melindungi industri-industri yang menjadi tulang-punggung perekonomian nasional. *Kedua*, adalah proteksionisme. Hal itu nampak pada pernyataan Presiden Jokowi dengan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi dengan memerangi tindakan-tindakan yang dianggap merugikan industri domestik. Proteksionisme bertujuan untuk melindungi industri lokal dari persaingan internasional yang dianggap tidak adil atau memiliki bias tertentu. *Ketiga*, adalah solidaritas regional. Pernyataan Presiden Jokowi menyebutkan kerjasama dengan Malaysia untuk melawan diskriminasi Uni Eropa mencerminkan perasaan yang sama untuk menghadapi tantangan global dengan memperkuat posisi tawar dan melawan tekanan internasional. *Keempat*, adalah Anti Neo-Kolonialisme. Dalam pernyataan Presiden Jokowi tersebut, mencerminkan bahwa tindakan diskriminasi Uni Eropa ini merupakan bentuk neo-kolonialisme oleh negara-negara maju. Kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit ini dilihat sebagai upaya untuk mendikte praktik-praktik ekonomi negara-negara berkembang. Pernyataan Presiden Jokowi secara tidak langsung juga mencerminkan penolakan terhadap intervensi asing yang dirasa mampu menghambat pembangunan ekonomi negara.

4.2 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi, Untuk Indonesia Perlu Memperkuat Kerjasama Hadapi Diskriminasi Minyak Sawit oleh Uni Eropa



Gambar 6. Tofan Mahdi sebagai Ketua Bidang Komunikasi GAPKI dalam Wawancara Virtual dengan CNBC

Sumber: Warta Ekonomi, 2023

Dalam berita yang disajikan oleh *website* Warta Ekonomi yang berjudul, “Indonesia dan Malaysia Perlu Perkuat Kerja Sama Hadapi Diskriminasi Minyak Sawit Eropa” pada 10 Januari 2023. Tofan Mahdi menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia perlu komitmen dan kerjasama sebagai upaya memperkuat posisi tawar sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Hal tersebut terekam dalam wawancara Tofan Mahdi dengan media CNBC Indonesia berikut (CNBC, 2023):

“Kalau kita bicara dalam konteks negara produsen minyak sawit yang paling utama ya dua negara ini, Indonesia dan Malaysia. Tapi apapun itu kita bersyukur karena sudah hadir paling tidak komitmen kemudian kerjasama dan kesepakatan sinergitas antar negara-negara produsen minyak sawit ini bisa semakin baik kedepannya, Dalam konteks Indonesia dan Malaysia ini kan sebetulnya kan kita berhadapan dengan dalam tanda kutip kan lawan yang sama karena kita harus menundukkan komoditas minyak sawit ini berada dimana? terus kemudian pesaingnya siapa? dan apa saja tantangan dalam persaingan pasar yang dapat di global?” Ketua Bidang Komunikasi GAPKI – Tofan Mahdi

Dalam wawancara tersebut, Tofan Mahdi juga mengatakan bahwa Indonesia menyumbang 50 juta ton volume nilai produksi sawit dan Malaysia menyumbang 22 juta ton volume nilai produksi sawit dunia, kedua negara tersebut adalah penguasa pasar minyak nabati global (CNBC, 2023).

“Sebetulnya di antara negara-negara produsen minyak sawit terutama Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit terbesar di dunia yang kita tahu dari produksi di Indonesia sekitar 50 juta ton dan Malaysia 22 juta ton per tahun itu sudah merupakan 85% dari pangsa pasar minyak nabati global”
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI – Tofan Mahdi

Ia pun menuturkan bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil minyak kelapa sawit global sampai saat ini dihadapkan dengan adanya diskriminasi dan kampanye negatif minyak sawit dari negara-negara produsen komoditas minyak nabati non-kelapa sawit. Baginya, berbagai diskriminasi dan kampanye negatif tersebut diakibatkan oleh persaingan dagang antarnegara produsen. Diskriminasi dan kampanye negatif tersebut perlu menjadi perhatian bersama bagi Indonesia dan Malaysia karena diskriminasi dan kampanye negatif tersebut diberlangsungkan dalam rangka untuk menurunkan daya saing minyak nabati kelapa sawit di pasar global (CNBC, 2023).

“Kita melihat dalam konteks pasar minyak sawit Indonesia dan Malaysia sebetulnya tantang yang saya tahu terutama di pasar negara maju, seperti khususnya Eropa yang dari tahun ke tahun memang tidak pernah selesai sampai hari ini selalu melakukan diskriminasi terhadap komoditas minyak sawit ini. Nah inilah yang seharusnya menjadi konsen pertama antara Indonesia dan Malaysia”
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI – Tofan Mahdi

Hal tersebut diperkuat oleh Ketua Umum DPP Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), Gulat Manurung bahwa petani kelapa sawit harus selalu dilibatkan dalam diplomasi dan negosiasi dalam melawan diskriminasi perdagangan oleh negara-negara maju yang salah satunya adalah Uni Eropa. Ia pun juga menegaskan bahwa 42% perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah milik petani dan petani adalah masa depan industri sawit Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu indikator dalam analisis wacana kritis Van Dijk adalah Tindakan. Tindakan merujuk kepada pernyataan dianggap memiliki tujuan tertentu. Dalam berita tersebut, Tofan Mahdi mengatakan bahwa

Indonesia dan Malaysia memiliki nilai volume produksi masing-masing 50 juta ton dan 22 juta ton. Hal ini membuat kedua negara tersebut sebagai penguasa pasar minyak nabati global. Wacana yang disampaikan tersebut sebagai bentuk tindakan untuk mempertegas posisi kedua negara tersebut di pasar global khususnya untuk komoditas kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia sebagai pemimpin pasar global untuk komoditas sawit sudah semestinya memiliki daya tawar yang tinggi dalam isu diskriminasi dan kampanye negatif yang dilayangkan oleh negara-negara maju maupun negara-negara produsen minyak nabati non-kelapa sawit. Selain itu, Tofan Mahdi juga mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia harus selalu kompak dalam menghadapi diskriminasi dan kampanye negatif kelapa sawit oleh Uni Eropa. Pernyataan tersebut juga merupakan bentuk tindakan yang mencerminkan tindakan kolektif yang diambil oleh pelaku industri kelapa sawit untuk melawan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Seperti yang telah disebutkan bahwa tindakan tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat posisi tawar negara produsen kelapa sawit di pasar global.

Selain itu, Tofan Mahdi juga menegaskan bahwa diskriminasi dan kampanye negatif yang dilayangkan oleh Uni Eropa dan beberapa negara produsen minyak nabati non-kelapa sawit ini tercipta atas persaingan dagang antar komoditas. Wacana sebagai tindakan yang dimaksudkan disini mencerminkan adanya persaingan dagang yang serius antara negara-negara minyak nabati sawit dan non-sawit dan hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat diperlukan hal-hal strategis untuk memperkuat daya saing minyak nabati kelapa sawit di pasar global.

Selanjutnya, dalam indikator kedua dalam analisis wacana kritis Van Dijk, yaitu konteks. Konteks merujuk kepada profil dan latarbelakang aktor yang menyampaikan serta latar (*setting*) pernyataan tersebut disampaikan. Pada wacana tersebut, Tofan Mahdi menyatakan pernyataannya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bidang Komunikasi GAPKI dan sebagai *Senior Vice President (SVP) Communication* PT Astra Agro Lestari. Seperti yang diketahui bahwa GAPKI merupakan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia dan hal ini merupakan representasi para pelaku usaha sawit di sektor Industri. Dalam konteks tersebut, Tofan Mahdi menyatakan dalam wawancaranya secara virtual dengan CNBC

yang merupakan salah satu media ekonomi-politik dan bisnis populer di Indonesia dengan audiensnya adalah masyarakat Indonesia, khususnya adalah orang-orang yang memiliki minat ke bahasan ekonomi-politik dan bisnis. Dalam keterangannya tersebut, ia bermaksud untuk memberikan kondisi aktual mengenai posisi Indonesia dan Malaysia sekaligus ajakan untuk melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sebagai Ketua Bidang Komunikasi GAPKI dan kalangan profesional di bidang kelapa sawit, Tofan Mahdi memiliki peranan penting dalam merespon berbagai isu diskriminasi dan kampanye negatif yang dilayangkan oleh Uni Eropa.

Pada indikator ketiga dalam analisis wacana kritis Van Dijk, yaitu historis. Wacana yang muncul tidak terjadi semerta-merta, melainkan terdapat fakta historis yang melatarbelakanginya. Pada sisi historis, wacana yang disampaikan oleh Tofan Mahdi tersebut muncul sebagai akibat dari beberapa kebijakan Uni Eropa serta banyaknya kampanye negatif yang dilayangkan oleh negara-negara produsen minyak nabati non-sawit untuk menurunkan daya saing kelapa sawit Indonesia-Malaysia di pasar global. Wacana tersebut muncul karena adanya isu pengesahan EUDR pada akhir tahun 2022 oleh Uni Eropa yang mencoba mendiskriminasi komoditas kelapa sawit Indonesia-Malaysia dan negara-negara produsen sawit yang dianggap hasil dari deforestasi. Perlu diketahui bahwa Tofan Mahdi juga tidak sekali berbicara mengenai hal ini. Pada tahun 2019, ia juga menyampaikan keberatannya terhadap implementasi RED II oleh Uni Eropa yang menyebabkan pengurangan volume kelapa sawit untuk penggunaan Biofuel (Warta Ekonomi, 2019). Sejarah tersebutlah yang memberikan latar belakang bagi pernyataan Tofan Mahdi tentang betapa pentingnya memperkuat Kerjasama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berulang dari dunia internasional.

Selanjutnya, pada indikator kekuasaan dalam analisis wacana kritis Van Dijk, yaitu kekuasaan. Kekuasaan merujuk kepada wacana dianggap sebagai alat atau instrumen untuk menguasai kelompok atau pihak tertentu. Wacana yang disampaikan oleh Tofan Mahdi terkait dengan dinamika kekuasaan. GAPKI sebagai organisasi yang mewakili pengusaha kelapa sawit memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan kebijakan pemerintah. Pernyataan atau wacana tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memobilisasi dukungan politik dan

ekonomi baik di tingkat domestik maupun internasional untuk melawan kebijakan diskriminatif yang dilayangkan oleh Uni Eropa. Tofan Mahdi telah menggunakan posisinya untuk mempengaruhi pengambilan Keputusan dan meraih dukungan publik yang lebih luas.

Selanjutnya, pada indikator Ideologi, pernyataan Tofan Mahdi tentang pentingnya untuk selalu kompak antara Indonesia-Malaysia dalam menghadapi diskriminasi kelapa sawit menunjukkan adanya semangat kolegal-regional dalam mempertahankan kedaulatan industri khususnya di sektor kelapa sawit. Mengingat komoditas ini menyumbang devisa dalam jumlah yang besar bagi masing-masing negara. Selain itu, pernyataan tersebut mencerminkan ideologi proteksionisme dan nasionalisme ekonomi yang mana kedua negara produsen kelapa sawit tersebut diharapkan bersatu untuk melindungi kepentingan nasional bersama dari intervensi asing. Dengan demikian, hal ini mencerminkan pandangan bahwa diskriminasi terhadap kelapa sawit bukan permasalahan ekonomi saja, melainkan masalah kedaulatan dan keadilan secara global.

4.3 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof, Mengajak Indonesia Untuk Stop Ekspor Kelapa Sawit ke Uni Eropa (12 Januari 2023)



Gambar 7. Pemberitaan Terkait Pernyataan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof Mengajak Indonesia Untuk Stop Ekspor Kelapa Sawit ke Uni Eropa

Sumber: Bisnis Ekonomi, 2023

Dalam berita yang disajikan pada *website* Bisnis Finansial yang berjudul, “Malaysia Ajak Indonesia Stop Ekspor Sawit (CPO) ke Uni Eropa” pada 12 Januari 2023, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof, menyampaikan bahwa Malaysia sebagai produsen sawit terbesar kedua di dunia akan mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor ke Uni Eropa sebagai pembalasan atas peraturan deforestasi baru tersebut (Bisnis Ekonomi, 2023).

“Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia akan mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor ke Uni Eropa sebagai pembalasan atas peraturan deforestasi baru blok tersebut. Itu adalah salah satu opsi bagi kami, tetapi kami harus berdiskusi dulu dengan Indonesia. Kami akan memiliki satu suara yang lebih kuat jika kita bergandengan tangan dengan Indonesia” – Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof

Baginya, peraturan tersebut merupakan tindakan untuk melakukan pemblokiran terhadap akses pasar minyak sawit. Malaysia juga

mempertimbangkan untuk berdiskusi dengan Indonesia sebagai sesama produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar terkait opsi penghentian pengiriman ke Uni Eropa. Menurutmnya kerjasama di antara kedua negara tersebut sangat penting dalam rangka untuk mengatasi hambatan perdagangan dan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit. Dia pun menyatakan bahwa Malaysia akan memiliki satu suara yang kuat jika bekerjasama dengan Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini.

Pada indikator dalam analisis wacana kritis Van Dijk, yaitu tindakan, pernyataan yang disampaikan oleh aktor dianggap memiliki tujuan tertentu. Dalam berita tersebut, Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar kedua mempertimbangkan untuk melakukan pemberhentian ekspor ke Uni Eropa sebagai pembalasan atas peraturan EUDR tersebut. Wacana yang disampaikan tersebut sebagai bentuk tindakan untuk memberikan penegasan terhadap posisi Malaysia kepada Uni Eropa sebagai produsen terbesar kedua di dunia dalam komoditas kelapa sawit. Dampak dari pemblokiran ini dapat berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan rantai pasok kelapa sawit baik secara regional maupun secara global. Banyak industri dari berbagai sektor yang memanfaatkan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai salah satu bahan dalam produk industri, seperti FMCG, kosmetik, hingga biofuel di perusahaan-perusahaan Uni Eropa. Dampak dari ketidakstabilan rantai pasok ini dapat membuat ketidakstabilan ekonomi di Uni Eropa. Oleh karena itu, tindakan berupa pernyataan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia tersebut dapat menjadi nilai tawar yang bagus bagi negosiasi antara negara produsen kelapa sawit dengan Uni Eropa. Namun, Fadillah Yusof juga mengatakan bahwa skenario tersebut adalah salah satu opsi untuk menekan Uni Eropa untuk meninjau kembali EUDR tersebut. Selain itu, ia juga hendak berdiskusi terlebih dahulu dengan negara-negara produsen kelapa sawit yang salah satunya adalah Indonesia. Tindakan tersebut mencerminkan bahwa Malaysia membutuhkan dukungan dari Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia untuk mendukung narasinya dan merancang strategi-strategi lainnya dalam rangka untuk menekan Uni Eropa. Hal ini mencerminkan adanya potensi kolaborasi antara Malaysia-Indonesia dalam rangka menekan diskriminasi dan kampanye negatif dari Uni Eropa.

Selain itu, pada indikator selanjutnya, yaitu konteks. Konteks merujuk kepada profil dan latarbelakang aktor yang menyampaikan serta latar (*setting*) pernyataan tersebut disampaikan. Pada wacana tersebut, Fadillah Yusof memberikan wacana dalam kapasitasnya sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Dalam kapasitasnya tersebut, ia merepresentasikan sikap pemerintah Malaysia dalam menanggapi isu diskriminasi dan kampanye negatif oleh Uni Eropa pada komoditas kelapa sawit. Dalam konteks latar (*setting*), Fadillah Yusof menyatakan wacana tersebut dalam wawancaranya dengan wartawan Bloomberg pada 12 Januari 2023 yang ia tahu bahwa pernyataannya akan dipublikasikan ke publik. Dalam keterangannya tersebut, ia bermaksud untuk memberikan konteks masalah dan skenario strategi yang hendak dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Pada indikator selanjutnya dalam analisis wacana kritis adalah historis. Wacana yang muncul tidak datang dari ruang hampa, melainkan terdapat fakta historis yang melatarbelakanginya. Pada sisi historis, wacana yang disampaikan oleh Fadillah Yusof tersebut muncul sebagai akibat dari beberapa kebijakan Uni Eropa, seperti RED dan EUDR serta banyaknya kampanye negatif yang dilayangkan oleh negara-negara produsen minyak nabati, LSM, dan organisasi internasional yang menganggap perkebunan kelapa sawit memberikan dampak negatif ke lingkungan, seperti kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa liar, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada hal lain, Malaysia dan Indonesia juga sudah mempromosikan keberlanjutan dalam produksi minyak kelapa sawit. Kedua negara tersebut telah memperkenalkan skema sertifikasi seperti *Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)* dan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* sejak tahun 2015 yang dituangkan melalui peraturan legislasi negara masing-masing. Skema sertifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan implementasi produksi kelapa sawit yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan citra minyak kelapa sawit di pasar global. Namun, Uni Eropa justru membuat peraturan (EUDR) yang membuat kerugian materiil terhadap industri kelapa sawit dari negara-negara produsen. Hal tersebutlah yang memicu wacana tersebut muncul.

Pada indikator kekuasaan dalam analisis wacana kritis Van Dijk, kekuasaan merujuk kepada wacana dianggap sebagai alat atau instrumen untuk

menguasai kelompok atau pihak tertentu. Wacana yang disampaikan oleh Fadillah Yusof tersebut merepresentasikan sikap pemerintah Malaysia dan beberapa negara produsen kelapa sawit yang hendak menguasai sentimen negatif Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memobilisasi dukungan dari negara-negara produsen sawit untuk melawan kebijakan diskriminatif yang dilayangkan oleh Uni Eropa. Fadillah Yusof telah menggunakan posisinya untuk mempengaruhi negara-negara produsen sawit lainnya, termasuk Indonesia untuk mempertimbangkan opsi memberhentikan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa.

Terakhir, pada indikator Ideologi, pernyataan Fadillah Yusof tentang pemberhentian ekspor kelapa sawit tersebut menunjukkan adanya kedaulatan ekonomi, yaitu negara produsen kelapa sawit memiliki hak untuk mengontrol sumber daya alamnya sendiri tanpa ada intervensi atau regulasi dari negara lain yang dianggap tidak adil. Selain itu dalam pernyataan ajakan ke Indonesia sebagai negara produsen terbesar, hal ini menunjukkan adanya semangat kolektif tingkat regional. Malaysia mengajak Indonesia untuk bergabung menghentikan ekspor dan Malaysia menekankan pentingnya kerjasama regional untuk menghadapi tantangan bersama yang merugikan. Selain itu, pernyataan Malaysia juga mencerminkan proteksionisme untuk melindungi industri-industri domestik (terutama sawit) dari persaingan dagang internasional yang dianggap tidak adil dan merugikan. Dengan mengancam pemberhentian ekspor, Malaysia berusaha untuk menunjukkan keinginan untuk melindungi industri minyak kelapa sawit mereka dari regulasi Uni Eropa.

4.4 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Dirjen Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Ahmad Parveez Ghulam, Tentang Strategi Untuk Menekan Uni Eropa Berkaitan Dengan Isu Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa



Gambar 8. Pemberitaan Terkait Pernyataan Dirjen Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Ahmad Parveez Ghulam tentang Strategi Untuk Menekan Uni Eropa Berkaitan dengan Isu Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa

Sumber: The Star, 2023

Dalam berita yang disajikan oleh *website* The Star (media Malaysia) yang berjudul, “*Strategy to Fight Anti-Palm Oil Lobby Will Pressure EU*” pada 16 Januari 2023. Dirjen Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Ahmad Parveez Ghulam, menyatakan bahwa kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia dalam melawan diskriminasi kelapa sawit akan memberikan tekanan yang cukup signifikan ke Uni Eropa. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa forum *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOC) dapat menjadi wadah mencari strategi untuk memberikan tekanan pada Uni Eropa dan blok dagangnya, sehingga Uni Eropa dan blok dagangnya tersebut tidak semena-mena dalam membuat aturan yang dianggap mendiskriminasi komoditas minyak kelapa sawit dan membuat mereka lebih rasional dan Adil (The Star, 2023).

“Both countries through the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) will find ways to put pressure on the EU so that the bloc does not arbitrarily bully Malaysia and Indonesia. If we feel the approach is strategic and helpful, I believe we should continue it with Indonesia so that both countries are not randomly pressured with new rules which put aside and ignore palm. When we are united and make a decision not to supply palm oil to them, then it will make

some impact and put pressure on them so that they are more rational and fair.” –
Dirjen MPOB Ahmad Parveez

Berdasarkan hal tersebut, salah satu indikator dalam analisis wacana kritis Van Dijk adalah Tindakan. Tindakan merujuk kepada pernyataan dianggap memiliki tujuan tertentu. Dalam berita tersebut, Ahmad Parveez menyatakan bahwa perlu adanya kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia dalam melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Hal tersebut mencerminkan himbauhan bagi pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk turut serta berkolaborasi membuat strategi yang mampu melawan diskriminasi tersebut. Strategi tersebut mencakup strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan manfaat dan keberlanjutan kelapa sawit dengan menggunakan data-data ilmiah, mengingat Malaysia dan Indonesia juga memiliki sistem kelapa sawit berkelanjutan yang dituangkannya dalam kebijakan masing-masing negara berupa sertifikasi MSPO dan ISPO. Selain itu, perlu dilakukan kolaborasi dengan pihak yang berkepentingan. Dalam hal lain, Ahmad Parveez juga menyatakan bahwa Malaysia dan Indonesia perlu memanfaatkan CPOC sebagai wadah untuk mencari strategi yang mampu menekan Uni Eropa dan blok dagangnya, sehingga Uni Eropa tidak semena-mena. Pernyataan ini mencerminkan dua hal: *Pertama*, Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir sudah semena-mena dalam mengintervensi persaingan dagang minyak nabati dengan mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit melalui beberapa kebijakan, seperti RED II dan EUDR. *Kedua*, Ahmad Parveez berusaha untuk mendorong adanya kolaborasi dengan CPOC sebagai forum yang berisi negara-negara produsen sawit untuk menyusun strategi jangka pendek-menengah-panjang dalam mengatasi diskriminasi kelapa sawit Uni Eropa dan blok dagangnya.

Selanjutnya, dalam indikator kedua dalam analisis wacana kritis Van Dijk, yaitu konteks. Konteks merujuk kepada profil dan latarbelakang aktor yang menyampaikan serta latar (*setting*) pernyataan tersebut disampaikan. Ahmad Parveez Ghulam menyatakan pernyataannya dalam kapasitasnya sebagai Dirjen MPOB yang merupakan Badan Usaha Milik Negara Malaysia yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. Hal ini mencerminkan Ahmad Parveez memiliki

posisi yang kuat dalam menyampaikan wacana tersebut karena ia juga mewakili pengusaha-pengusaha kelapa sawit di Malaysia. Selain itu, dari konteks latar (*setting*), Ahmad Parveez juga diwawancara secara luring oleh media *The Star* yang merupakan salah satu media tier 1 di Malaysia pada acara CEO Day di Universitas Kebangsaan Malaysia pada Januari 2023. Dalam keterangan tersebut, ia menghimbau Malaysia dan Indonesia untuk segera menentukan strategi dalam rangka menekan kampanye negatif dan diskriminasi oleh Uni Eropa dan blok dagangnya.

Pada indikator selanjutnya, yaitu historis, wacana yang disampaikan oleh Ahmad Parveez tersebut muncul sebagai akibat dari beberapa kebijakan Uni Eropa serta banyaknya kampanye negatif yang dilayangkan oleh blok dagang dan beberapa organisasi internasional untuk menurunkan daya saing kelapa sawit Malaysia di pasar global. Wacana tersebut muncul karena adanya isu pengesahan EUDR pada akhir tahun 2022 oleh Uni Eropa yang mencoba mendiskriminasi komoditas kelapa sawit Malaysia-Indonesia dan negara-negara produsen sawit yang dianggap hasil dari deforestasi. Jauh sebelum EUDR itu disahkan, Malaysia pun sudah membuat sistem kelapa sawit berkelanjutan dalam bentuk sertifikasi (MSPO) dan berusaha untuk berkompromi dengan dunia internasional terkait implementasi sawit. Dalam keberjalannya, MPOB sudah berulang kali membela industri minyak sawit dari tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Uni Eropa dan bloknnya, seperti kelapa sawit mengakibatkan perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan hilangnya keanekaragaman satwa liar akibat pembabatan hutan. Pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Parveez mencerminkan kelanjutan dari upaya MPOB untuk melindungi kepentingan industri minyak kelapa sawit Malaysia.

Selanjutnya, pada indikator kekuasaan dalam analisis wacana kritis Van Dijk, yaitu kekuasaan. Kekuasaan merujuk kepada wacana dianggap sebagai alat atau instrumen untuk menguasai kelompok atau pihak tertentu. Dalam kapasitasnya sebagai Dirjen MPOB, Ahmad Parveez berusaha untuk mempengaruhi opini negara, aliansi negara, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sawit dalam negeri maupun luar negeri untuk membuka mata dan bergerak melawan intervensi dari luar. Dalam hal lain, Ahmad Parveez menggunakan posisinya

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terkait strategi yang hendak dicapai melalui forum CPOC.

Terakhir, indikator Ideologi dalam pernyataan Ahmad Parveez menyiratkan bahwa pentingnya perlindungan terhadap kepentingan nasional serta industri minyak sawit di Malaysia. Pernyataan tersebut juga mencerminkan penekanan pada pentingnya keberlanjutan (*sustainability*) dan praktik-praktik ramah lingkungan sebagai upaya untuk mengimbangi tuduhan negatif dari pihak internasional. Selain itu, pernyataan Ahmad Parveez juga mencerminkan adanya semangat kolektif dan perasaan bersama dari negara-negara yang terdampak diskriminasi oleh Uni Eropa tersebut. Ia berusaha membangun narasi untuk terus mendorong semangat kolektif dalam membangun strategi untuk melawan intervensi berupa diskriminasi dan kampanye negatif yang telah dilayangkan.

4.5 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, Tentang Ajakan Untuk Kerjasama Melawan Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa



Gambar 9. Pemberitaan Terkait Pernyataan Menteri Koordinator Ekonomi RI, Airlangga Hartanto, tentang Kesepakatan Indonesia-Malaysia Lawan Diskriminasi Uni Eropa

Sumber: Kompas, 2023

Dalam berita yang disajikan oleh *website* Kompas yang berjudul, “Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa”

pada 9 Februari 2023. Airlangga Hartanto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi RI menyatakan bahwa Indonesia sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerjasama mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit dan menanggapi isu meningkatnya kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit. Ia pun menyatakan sepakat untuk melakukan misi bersama dengan Malaysia ke Uni Eropa untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan dari implementasi peraturan Uni Eropa terutama untuk sektor kelapa sawit. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa tidak hanya Indonesia dan Malaysia, melainkan CPOPC juga ikut terlibat dengan Uni Eropa dalam mencapai hasil yang menguntungkan bagi keduanya, baik negara produsen dan konsumen dari komoditas ini (Kompas, 2023).

“Kami sepakat terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerja sama mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit dan menanggapi meningkatnya kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit” – Menko Perekonomian RI Airlangga Hartanto

Berdasarkan hal tersebut, salah satu indikator dalam analisis wacana kritis Van Dijk adalah Tindakan. Tindakan merujuk kepada pernyataan dianggap memiliki tujuan tertentu. Dalam berita tersebut, pernyataan yang dilayangkan oleh Airlangga Hartanto mengenai kesepakatan antara Indonesia-Malaysia untuk melawan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa mencerminkan tindakan yang strategis dan simbolis. Secara strategis, hal ini menunjukkan bahwa kedua negara tidak akan tinggal diam terhadap intervensi berupa regulasi yang dianggap merugikan industri kelapa sawit mereka. Selain itu, tindakan tersebut juga mencerminkan langkah diplomatic yang kuat untuk melindungi kepentingan ekonomi baik pada skala nasional maupun regional. Secara simbolis, tindakan tersebut mencerminkan adanya kekompakan dan solidaritas antardua negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tindakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk masyarakat domestik, melainkan juga internasional dengan menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia siap bekerjasama untuk menghadapi tantangan global dan melindungi kepentingan strategis mereka. Dengan pernyataan tersebut, Airlangga Hartanto berusaha untuk mengirim pesan tegas kepada Uni Eropa

bahwa kebijakan diskriminatif mereka akan mendapatkan perlawanan yang terorganisir dan sistematis.

Selain itu, dalam indikator kedua dalam analisis wacana kritis Van Dijk, yaitu konteks. Konteks merujuk kepada profil dan latarbelakang aktor yang menyampaikan serta latar (*setting*) pernyataan tersebut disampaikan. Dalam pernyataan yang disampaikan, Airlangga Hartanto berbicara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi RI yang secara jabatan juga merepresentasikan sikap pemerintah Indonesia dalam merespon isu mengenai persaingan dagang internasional. Wacana tersebut disampaikan dalam situasi dimana Uni Eropa telah menerapkan regulasi yang ketat berupa Uji Tuntas semua komoditas nabati yang diimpor ke negara-negara Uni Eropa, salah satunya adalah kelapa sawit, dengan alasan keberlanjutan dan dampak kerusakan lingkungan. Pada latar (*setting*), Airlangga Hartanto berbicara pada Press Conference CPOPC Indonesia-Malaysia pada 9 Februari 2023 di hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Pada indikator selanjutnya, yaitu historis, pernyataan Airlangga Hartanto tersebut akibat munculnya kebijakan diskriminatif Uni Eropa (EUDR) yang disahkan pada 2022. Perdebatan dan diskriminasi tersebut sudah berlangsung lama dan kontroversial. Aktivitas produksi komoditas kelapa sawit dianggap bertanggungjawab atas deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia dan Malaysia telah berulang kali menghadapi tekanan internasional untuk meningkatkan praktik keberlanjutan dalam industri sawit mereka. Namun, kebijakan diskriminatif Uni Eropa juga dianggap sebagai langkah proteksionisme terselubung yang bertujuan untuk melindungi industri minyak nabati mereka sendiri dalam kompetisi global. Terutama pada komoditas biji bunga matahari dan kedelai. Pernyataan yang dilayangkan oleh Airlangga Hartanto tersebut juga tidak hanya merespon isu kontemporer melainkan sejarah Panjang perjuangan kedua negara dalam mempertahankan posisi mereka di pasar global.

Pada indikator keempat, yaitu kekuasaan, pernyataan Airlangga Hartanto juga menunjukkan pemerintah Indonesia-Malaysia berusaha untuk meraih dukungan dan pengaruh regional hingga internasional. Wacana yang digunakan

dapat menjadi alat untuk mempengaruhi negara-negara lain yang tidak setuju dengan intervensi kebijakan barat dan kemudian membentuk aliansi strategis dengan menggunakan diplomasi untuk menekan Uni Eropa agar merubah kebijakannya yang dianggap diskriminatif. Wacana tersebut juga dapat menjadi alat untuk daya tawar kepada negara-negara pengimpor sawit lainnya untuk ikut serta melawan praktik diskriminasi oleh Uni Eropa tersebut. Selain itu, posisi yang kuat Indonesia-Malaysia juga dapat memanfaatkan forum internasional, seperti WTO untuk menantang kebijakan Uni Eropa. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa kekuasaan tidak hanya dilihat dari aspek militer atau ekonomi saja, melainkan kemampuan diplomasi dan mobilitasi aliansi internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan internasional.

Terakhir, pada indikator selanjutnya, yaitu ideologi, pernyataan Airlangga Hartanto mencerminkan nasionalisme ekonomi, dimana kepentingan ekonomi nasional dan regional diutamakan di atas tekanan internasional. Ideologi tersebut juga mencerminkan semangat kemandirian dan perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju. Indonesia dan Malaysia memiliki hak untuk mengembangkan industri strategis tanpa harus tunduk pada regulasi global yang tidak adil. Selain itu, ideologi tersebut juga mencerminkan adanya upaya untuk melindungi mata pencaharian jutaan petani dan pelaku usaha yang bergantung pada industri kelapa sawit. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga politis. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya Indonesia-Malaysia bersatu melawan kolonialisme baru yang dilakukan oleh negara-negara barat, terutama Uni Eropa.

4.6 Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, Mengajak Indonesia Untuk Terus Berkolaborasi Memerangi Diskriminasi Sawit Malaysia



Gambar 10. Pemberitaan Terkait Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, tentang Kolaborasi Indonesia-Malaysia Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit Uni Eropa

Sumber: The Star, 2023

Dalam berita yang disajikan oleh *website* The Star yang berjudul, “*More collaboration between Malaysia, Indonesia to fight palm oil ‘discrimination’*” pada 8 Juni 2023. Dalam berita tersebut, Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia akan terus menggaungkan peningkatan kolaborasi antara Malaysia dan Indonesia untuk melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. Menurutnya, kedua negara tersebut sudah sepakat untuk bekerjasama melawan standardisasi Uni Eropa dalam menyeleksi barang impor yang masuk ke wilayahnya melalui aturan terbaru yang dianggap diskriminatif, yaitu EUDR. Selain itu, menurutnya, Uni Eropa perlu melakukan kesepakatan terkait standar uji tuntas kepada negara-negara produsen supaya lebih adil dan menemukan solusi terbaik. Dia juga menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya Indonesia-Malaysia satu suara dalam melindungi kepentingan industri kelapa sawit (The Star, 2023).

“Both leaders undertook to cooperate closely to address highly detrimental discriminatory measures against palm oil by the EU through the introduction of the EU Deforestation Regulation (EUDR). They underline that the EU needs to

promptly address such discriminatory measures and work towards a fair and equitable resolution. For the first time, there is one voice between Malaysia and Indonesia to defend the interests of palm oil.” – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim

Berdasarkan hal tersebut, salah satu indikator dalam analisis wacana kritis Van Dijk adalah tindakan. Tindakan merujuk kepada pernyataan dianggap sebagai perilaku yang memiliki tujuan tertentu. Dalam berita tersebut, Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia menyatakan peningkatan terhadap kolaborasi dengan Indonesia dan sepakat untuk bekerjasama melawan diskriminasi Uni Eropa melalui aturan yang telah dibuat Uni Eropa tentang standardisasi komoditas yang masuk ke wilayahnya itu bebas deforestasi. Hal ini menunjukkan tindakan strategis yang tidak hanya berbentuk retorika, tapi juga mencerminkan inisiatif diplomatic yang konkrit. Dengan mengajak Indonesia untuk memperkuat kerjasama, Anwar berusaha menciptakan sinergitas antardua negara sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Pernyataan tersebut juga sebagai tindakan untuk menggabungkan dua kekuatan besar dalam rangka menghadapi tantangan bersama yang ditimbulkan oleh kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Selain itu, pernyataan tersebut secara lugas mencerminkan upaya posisi tawar atau *bargaining point* kedua negara di pasar global dengan harapan dapat mempengaruhi arah kebijakan internasional (terutama Uni Eropa) yang lebih adil dan menguntungkan bagi industri minyak sawit. Selanjutnya, Anwar Ibrahim juga berusaha menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi yang erat antardua negara tersebut, mereka bisa mempromosikan praktik produksi minyak sawit yang berkelanjutan dan bertanggungjawab yang pada gilirannya dapat membantu mengubah persepsi negatif kelapa sawit di mata komunitas internasional.

Pada indikator kedua, yaitu konteks, dalam pernyataan yang disampaikan, Anwar Ibrahim berbicara dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang secara jabatan juga merepresentasikan sikap pemerintah Malaysia dalam merespon isu diskriminasi oleh Uni Eropa. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks meningkatnya tekanan dari Uni Eropa terhadap kelapa sawit yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama deforestasi dan perubahan iklim. Dengan dilahirkannya kebijakan baru, yaitu EUDR pada akhir 2022, hal ini

membuat komoditas kelapa sawit dari Malaysia dan Indonesia dibatasi secara volumenya karena Uni Eropa menerapkan standar uji tuntas. Dalam konteks tersebut, pernyataan Anwar Ibrahim juga menegaskan bahwa minyak sawit yang diproduksi dapat memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi dan berkontribusi positif terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Secara konteks latar (*setting*) pernyataan Anwar Ibrahim tersebut disampaikan saat acara kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia pada 8 Juni 2023 dan diliput oleh media The Star.

Pada indikator ketiga, yaitu historis, pernyataan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tidak muncul begitu saja, melainkan terdapat latarbelakang munculnya pernyataan tersebut. Pernyataan oleh Anwar Ibrahim tersebut merupakan pernyataan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada Januari 2023 dengan Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut muncul karena adanya pengesahan kebijakan EUDR oleh Uni Eropa pada akhir tahun 2022 yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit. Perlu diketahui bahwa sudah sejak lama kedua negara, Malaysia dan Indonesia telah mendapatkan kampanye negatif dan berbagai diskriminasi dari Uni Eropa, negara-negara barat, serta organisasi internasional lainnya. Diskriminasi tersebut muncul sebagai respon dari praktik penyelenggaraan industri kelapa sawit yang deforestatif, hilangnya habitat satwa liar, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan Anwar Ibrahim tersebut merupakan kelanjutan dari tradisi Panjang kerjasama tersebut dimana kedua negara berusaha menghadapi tekanan eksternal secara bersama-sama dan mencari solusi bagi kedua belah pihak.

Pada indikator keempat, yaitu kekuasaan, wacana dapat dianggap sebagai alat untuk mempengaruhi atau mengontrol pihak dan/atau kelompok tertentu. Pernyataan Anwar Ibrahim mencerminkan dinamika kekuasaan dalam perdagangan internasional, dimana negara-negara berkembang seperti Malaysia dan Indonesia berusaha untuk menegosiasikan posisi mereka *vis-à-vis* negara-negara maju, seperti Uni Eropa. Anwar Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri menggunakan otoritas politik dan diplomatiknya untuk membangun aliansi strategis dengan Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat posisi negosiasi kedua negara di arena internasional. Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana negara-negara produsen kelapa sawit berusaha untuk

mengubah keseimbangan kekuasaan yang selama ini menguntungkan negara-negara barat. Dengan menyerukan kolaborasi, Anwar Ibrahim tidak hanya menggalang dukungan regional saja, melainkan mencoba mempengaruhi public internasional dan mengubah persepsi negative terhadap minyak kelapa sawit. Upaya tersebut menekankan perlunya solidaritas nasional maupun regional untuk menghadapi tantangan bersama dan melindungi kepentingan ekonomi nasional dari praktik-praktik perdagangan internasional yang dianggap tidak adil dan diskriminatif.

Pada indikator terakhir, yaitu ideologi, pernyataan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia mengandung semangat nasionalisme ekonomi. Anwar menekankan bahwa komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang penting dan berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di Malaysia maupun di Indonesia. Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan ekonomi kedua negara. Pernyataan ini juga mencerminkan keadilan ekonomi, dimana Anwar Ibrahim mengkritik praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil dan cenderung merugikan negara produsen minyak kelapa sawit. Dalam hal lain, pernyataan Anwar Ibrahim juga mengandung semangat kolaborasi dan solidaritas regional dalam melawan ketidakadilan dan memastikan bahwa kepentingan negara-negara berkembang diakui dan dihormati di pasar global. Selain itu, Anwar Ibrahim juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dan tanggungjawab lingkungan dengan berusaha menunjukkan bahwa minyak sawit yang diproduksi oleh Malaysia dan Indonesia dapat memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi. Hal ini kemudian mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kerangka nasionalisme ekonomi dengan harapan dapat memperbaiki citra kelapa sawit di mata internasional.

4.7 Analisis Kognisi Sosial

Kognisi sosial dalam pandangan Van Dijk merupakan salah satu elemen penting dalam analisis wacana kritis. Kognisi sosial dihubungkan secara langsung dengan wacana saat wacana tersebut diproduksi. Komponen kognisi sosial tersebut terdiri dari pemahaman dan pengalaman yang terkandung di dalam

wacana yang telah disampaikan oleh para aktor yang ditujukan untuk tujuan tertentu (Dijk, 2001). Dengan demikian, pada setiap wacana yang disampaikan oleh para aktor dapat dilihat maksud, tujuan, serta keterkaitan antarwacana yang telah disampaikan.

Pada penelitian yang dilakukan terdapat enam wacana dari pejabat pemerintah maupun pejabat non-pemerintahan mengenai perlawanan terhadap diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. *Pertama*, wacana yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi mengajak Malaysia untuk memerangi perilaku diskriminasi Uni Eropa pada komoditas sawit. Berdasarkan pada analisis sebelumnya, wacana tersebut ditujukan untuk merespon polemik diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkannya. Ajakan yang digaungkan oleh Presiden Jokowi tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan tindakan kolektif pada level negara yang perlu diambil untuk meningkatkan daya tawar di mata internasional.

Kedua, wacana yang disampaikan oleh Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi, yang menyatakan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerjasama hadapi diskriminasi minyak sawit oleh Uni Eropa. Berdasarkan pada analisis sebelumnya, wacana yang dikeluarkan tersebut ditujukan untuk mempertegas posisi kedua negara (Indonesia-Malaysia) di pasar global khususnya pada komoditas kelapa sawit. Hal ini mencerminkan bahwa pada level profesional (non-negara) juga mendorong adanya sinergitas antardua negara untuk memperkuat posisi daya tawarnya dalam menghadapi intervensi kebijakan dari Uni Eropa.

Ketiga, wacana yang disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof, yang menyatakan bahwa Malaysia akan mengajak Indonesia untuk stop ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa. Berdasarkan pada analisis sebelumnya, rencana untuk memberhentikan pasokan kelapa sawit (CPO) ke Uni Eropa merupakan salah satu opsi yang dapat menekan Uni Eropa untuk mempertimbangkan dan/atau meninjau kembali kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu EUDR. Terdapat dua tujuan dalam wacana yang disampaikan tersebut, yaitu untuk memberikan penegasan dan meningkatkan daya tawar Malaysia-Indonesia

sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia dalam menghadapi diskriminasi kelapa sawit. Selain itu, Malaysia bertujuan untuk meraih dukungan Indonesia untuk mendukung narasinya tersebut.

Keempat, wacana yang disampaikan oleh Dirjen Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Ahmad Parveez Ghulam, yang menyatakan bahwa perlu strategi menekan Uni Eropa Berkaitan dengan diskriminasi kelapa sawit. Dalam analisis sebelumnya, wacana yang disampaikan tersebut bertujuan untuk mendorong kerjasama dan kolaborasi strategis antara Indonesia-Malaysia dalam melawan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Selain itu ia juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi dengan anggota-anggota yang tergabung dengan forum CPOPC sebagai wadah untuk merumuskan strategi yang mampu menekan Uni Eropa dan blok dagangnya.

Kelima, wacana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, menyatakan ajakan kepada Malaysia untuk bekerjasama melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Berdasarkan pada analisis sebelumnya, wacana tersebut mencerminkan tindakan yang strategis dan simbolis. Secara strategis, hal ini menunjukkan bahwa kedua negara tidak akan tinggal diam terhadap intervensi berupa regulasi yang dianggap merugikan industri kelapa sawit mereka. Selain itu, tindakan tersebut juga mencerminkan langkah diplomatic yang kuat untuk melindungi kepentingan ekonomi baik pada skala nasional maupun regional. Secara simbolis, tindakan tersebut mencerminkan adanya kekompakan dan solidaritas antardua negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tindakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk masyarakat domestik, melainkan juga internasional dengan menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia siap bekerjasama untuk menghadapi tantangan global dan melindungi kepentingan strategis mereka. Airlangga Hartanto berusaha untuk mengirim pesan tegas kepada Uni Eropa bahwa kebijakan diskriminatif mereka mendapatkan perlawanan yang terorganisir dan sistematis.

Keenam, wacana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menyatakan tentang perlu adanya kolaborasi yang lebih antara Indonesia-Malaysia dalam melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni

Eropa. Berdasarkan pada analisis sebelumnya, wacana tersebut ditujukan untuk memperkuat kolaborasi Indonesia-Malaysia dan menggabungkan dua kekuatan negara besar dalam melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkannya. Pernyataan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan posisi daya tawar kedua negara yang kemudian berharap dapat mempengaruhi arah kebijakan internasional (khususnya Uni Eropa) supaya lebih adil dan menguntungkan bagi industri kelapa sawit. Selain itu, pernyataan tersebut juga ditujukan untuk mempromosikan praktik produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggungjawab supaya dapat mengubah persepsi negatif kelapa sawit di mata komunitas internasional.

Berdasarkan pada paparan yang disampaikan sebelumnya, keenam wacana tersebut memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Namun, jika dilihat dari beberapa wacana tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa mereka memiliki tujuan akhir yang sama. Adapun tujuan tersebut adalah untuk memperkuat posisi dan daya tawar negara-negara produsen kelapa sawit dalam konteks ditetapkannya kebijakan EUDR oleh Uni Eropa pada akhir tahun 2022 yang dianggap diskriminatif terhadap komoditas kelapa sawit. Terlihat bahwa setiap aktor yang melayangkan wacana-wacana tersebut saling mendukung satu sama lain untuk saling memperkuat sinergitas dan kolaborasi untuk menentukan strategi-strategi dalam melawan diskriminasi kelapa sawit Uni Eropa. Adanya kemiripan dalam setiap wacana yang disampaikan tersebut menunjukkan adanya kesamaan dalam Ideologi yang dianut oleh setiap aktor. Ideologi dalam kajian analisis wacana kritis tersebut memiliki sifat koordinatif. Artinya, wacana yang disampaikan oleh beberapa aktor tersebut pada akhirnya mendukung dan meyakini hal yang sama.

Seperti halnya wacana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Januari 2023, itu didukung secara konsisten oleh beberapa pihak lainnya dari kalangan pemerintahan maupun non-pemerintahan yang berkepentingan pada masalah diskriminasi oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit tersebut. Adapun statemen tersebut didukung oleh Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Ekonomi RI), Tofan Mahdi (Kepala Bidang Komunikasi GAPKI), Fadill Yusof (Wakil Perdana Menteri Malaysia), serta Ahmad Parveez (Dirjen Dewan Minyak Sawit

Malaysia/MPOB). Dalam narasi yang disampaikan oleh para aktor tersebut mendukung adanya kolaborasi dan perumusan strategi untuk menekan intervensi Uni Eropa melalui kebijakan yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit.

Selain itu, kesamaan ideologi tersebut menunjukkan bahwa mereka dalam kelompok yang sama, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan yang lebih terhadap keberlangsungan komoditas kelapa sawit. Hal ini ditunjukkan pada empat dari aktor wacana adalah dari kalangan eksekutif negara masing-masing dan dua yang lain adalah dari kalangan profesional yang berkepentingan di industri kelapa sawit (dari pihak Indonesia dan Malaysia). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagai kelompok pemerintahan (eksekutif) dan kelompok non-pemerintahan berusaha untuk mendominasi wacana dalam publik domestik maupun internasional, terkhususnya pada Uni Eropa.

4.8 Wacana Dalam Konteks Sosial

Wacana yang disampaikan oleh para aktor berkembang di masyarakat. Wacana yang sudah berkembang tentu mendapatkan respon dari masyarakat dan dapat berupa dukungan, membantah, maupun memberikan pengaruh lain pada wacana tersebut. Dalam kaitannya dengan wacana terkait melawan diskriminasi kelapa sawit Uni Eropa yang berkembang dimasyarakat perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor, seperti konteks sosial dan respon dari masyarakat terkait hal tersebut. dalam menanggapi wacana dari pemangku kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada wacana yang disampaikan oleh pemangku kebijakan dan kalangan profesional di industri sawit, terdapat berbagai respon masyarakat dalam perkembangannya. Peneliti membagi kelompok masyarakat tersebut menjadi dua bagian, yaitu masyarakat yang berasal dari organisasi masyarakat yang memiliki kaitan langsung dengan industri sawit serta masyarakat umum. Masyarakat yang tergolong dalam organisasi masyarakat yang berkaitan dengan industri kelapa sawit cenderung mendukung untuk melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa tersebut. Mereka beranggapan bahwa mereka keberatan atau kurang puas

dengan kesepakatan oleh dialog Uni Eropa (Komisi Eropa, Parlemen Uni Eropa, dan Dewan Uni Eropa) pada 6 Desember tahun 2022 dalam menetapkan EUDR. Mereka menganggap bahwa regulasi yang telah ditetapkan tersebut akan berdampak secara tidak langsung terhadap mereka. Regulasi tersebut dianggap tidak cukup untuk benar-benar dapat digunakan sebagai upaya mencegah deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, kepunahan keanekaragaman hayati, perlindungan terhadap petani kecil, dan masyarakat adat. Mereka menilai bahwa regulasi tersebut hanya membatasi bahkan hanya membersihkan rantai pasok komoditas dan produk ke dalam pasar Uni Eropa semata. Baginya, hal tersebut merujuk kepada kepentingan ekonomi saja tidak menyelesaikan permasalahan mendasar yang menyebabkan adanya deforestasi dan degradasi hutan, serta luput dalam mempertimbangkan pemberian insentif dan dukungan terhadap komunitas-komunitas yang berupaya melaksanakan perlindungan tutupan hutan, pengurangan dan pencegahan deforestasi, serta reformasi pola produksi komoditas resiko hutan oleh negara-negara produsen yang saat ini sedang berupaya untuk menangani akar penyebab deforestasi. Hal tersebut tertuang dalam buku kajian komunitas CSO yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Barisan Pemuda Adat Nusantara, Forest Watch Indonesia, Green of Borneo, WALHI, dan beberapa Organisasi sipil masyarakat lainnya sebagai berikut:





Gambar 11. Buku Kajian Respon CSO's (Civil Society Organization) Indonesia terhadap Kesepakatan Final Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa

Sumber: CSO, 2023

Selain itu, dari kalangan masyarakat umum perihal kerjasama antara Indonesia-Malaysia dalam melawan isu diskriminasi kelapa sawit tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mereka beranggapan sudah selayaknya negara-negara produsen kelapa sawit bersatu untuk tidak tunduk kepada intervensi dari negara-negara barat, khususnya Uni Eropa. Bagi mereka, Indonesia dan Malaysia juga harus mampu berdikari secara ekonomi, khususnya di bidang kelapa sawit dan bebas intervensi dari negara-negara barat. Mereka juga menghimbau untuk terus menekan Uni Eropa supaya tidak semena-mena dalam membuat kebijakan yang berpotensi merugikan Indonesia-Malaysia mengingat komoditas kelapa sawit tersebut adalah komoditas yang penyumbang devisa bagi masing-masing negara.



Gambar 12. Respon Masyarakat terhadap Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Melawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa melalui kolom komentar Youtube Kompas

Sumber: Youtube Kompas, 2023



Gambar 13. Respon Masyarakat terhadap Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Melawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa melalui kolom komentar Youtube Metro TV

Sumber: Youtube Metro TV, 2023



Gambar 14. Respon Masyarakat terhadap Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Melawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa melalui kolom komentar Youtube The Stars (Media Malaysia)

Sumber: Youtube The Stars, 2023

Dalam perkembangan wacana yang disampaikan oleh aktor pemerintah (eksekutif) dan aktor profesional, nampaknya kedua kelompok tersebut telah melihat bahwa diskriminasi yang telah dilakukan oleh Uni Eropa beserta blok perdangannya tersebut merupakan bentuk kolonialisasi model baru dalam bidang ekonomi yang mencoba mempengaruhi kebijakan dalam negeri dalam pengelolaan serta produksi minyak kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat bahwa isu tersebut bukan hanya isu ekonomi semata, melainkan isu mengenai kedaulatan. Indonesia dan Malaysia bisa satu suara dalam hal kerjasama melawan intervensi Uni Eropa.

Selain itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia terlihat memiliki intensi untuk melindungi pengelolaan kelapa sawit di negaranya masing-masing yang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Dengan adanya produk hukum EUDR tersebut, bukan tidak mungkin sirkulasi rantai pasok kelapa sawit di negara produsen menjadi tidak stabil yang tentunya secara tidak langsung

dapat merugikan petani-petani kelapa sawit. Hal ini mencerminkan kepedulian pemerintah dan profesional dalam bidang kelapa sawit terhadap kondisi industri kelapa sawit dalam negerinya. Dalam hal lain, wacana dari pemerintah dan kalangan profesional tersebut juga dapat dimaknai sebagai cara untuk mendominasi wacana atau mempengaruhi opini publik secara nasional dan regional. Dengan adanya wacana kerjasama dan kolaborasi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa rakyat Malaysia dan Indonesia memiliki satu rasa yang sama dalam memandang hegemoni barat dan berani untuk menyuarakan perlawanan terhadap intervensi kebijakan dari luar negeri khususnya Uni Eropa. Selain itu, dalam perkembangannya, masyarakat Malaysia maupun Indonesia juga berharap bahwa pemerintah mereka tidak hanya satu suara dalam kelapa sawit saja, melainkan perlu kolaborasi lebih dari berbagai bidang supaya hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia menjadi lebih baik kedepannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi wacana tersebut dapat muncul. Setiap wacana yang dimunculkan oleh para aktor baik dari kalangan pemerintah (eksekutif) dan kalangan profesional dari Indonesia dan Malaysia terhadap diskriminasi Uni Eropa melalui penetapan EUDR pada tahun 2022 memiliki motif dan tujuan yang melatarbelakangi wacana tersebut dapat muncul. Motif dan tujuan yang diperoleh melalui analisis, kemudian dinarasikan dalam beberapa penjelasan berikut.

Pertama, Wacana Indonesia-Malaysia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia berkomitmen melawan praktik diskriminasi produk kelapa sawit oleh Uni Eropa melalui beberapa kebijakan, seperti RED II dan EUDR. EUDR dianggap mendiskriminasi komoditas-komoditas impor yang salah satunya adalah kelapa sawit karena perlu melakukan uji tuntas bebas deforestasi terlebih dahulu sebelum memasuki pasar Uni Eropa. Uni Eropa menganggap bahwa kelapa sawit yang datang dari kedua negara tersebut tidak bebas deforestasi, sehingga Uni Eropa membatasi impor untuk komoditas kelapa sawit tersebut. Wacana yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut merupakan salah satu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tawar dalam mempengaruhi kebijakan internasional, khususnya kebijakan EUDR yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Selain itu, wacana tersebut untuk memberikan penegasan terhadap dunia bahwa Indonesia dan Malaysia mampu berdaulat dan tidak dapat diatur oleh intervensi kebijakan luar negeri, khususnya Uni Eropa.

Kedua, wacana yang dikeluarkan Indonesia-Malaysia tersebut juga bertujuan untuk memproteksi keberlangsungan industri sawit dalam negeri masing-masing. Kedua negara tersebut tidak ingin dengan diberlakukannya EUDR, rantai pasok komoditas sawit mengalami ketidakstabilan, sehingga

mengganggu neraca ekspor komoditas sawit yang pada akhirnya dapat menghambat keberlangsungan para pelaku di industri sawit lainnya, seperti pengusaha sawit dan petani sawit.

Ketiga, wacana yang disampaikan oleh Indonesia-Malaysia tersebut juga menegaskan bahwa kedua negara juga mendukung program sawit keberlanjutan yang dituangkan dalam produk hukum berupa program sertifikasi kelapa sawit, seperti ISPO dan MSPO untuk melawan kampanye negatif yang menganggap bahwa produksi kelapa sawit tersebut dapat merusak lingkungan, menghilangkan satwa liar, mengakibatkan kekerasan Hak Asasi Manusia dan kekerasan terhadap masyarakat adat. Kedua negara tersebut menganggap bahwa ditetapkannya EUDR juga tidak mampu menyelesaikan masalah fundamental dari deforestasi dan masalah kelapa sawit berkelanjutan, melainkan justru hanya kepentingan ekonomi untuk memproteksi komoditas nabati lokal selain kelapa sawit yang ada di Uni Eropa.

Keempat, wacana yang disampaikan oleh Indonesia-Malaysia tersebut juga menegaskan adanya semangat solidaritas dari Indonesia-Malaysia karena kedua negara produsen kelapa sawit terbesar tersebut merasa telah didiskriminasi dengan adanya pembatasan impor oleh Uni Eropa dan penetapan EUDR. Dengan menggabungkan kekuatan tersebut dapat meningkatkan kolaborasi antarnegara untuk melawan diskriminasi bukan hanya permasalahan kelapa sawit saja, melainkan untuk komoditas-komoditas lain yang terdampak dari intervensi kebijakan tersebut.

Kelima, wacana yang disampaikan oleh Indonesia-Malaysia tersebut juga digunakan bukan hanya untuk mempengaruhi Uni Eropa dalam kebijakannya, melainkan juga digunakan untuk memobilisasi opini publik baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Mobilisasi opini penting untuk meraih dukungan sekaligus memberikan konteks ke publik bahwa saat ini kedua negara berkembang tersebut mampu untuk memerangi kebijakan diskriminatif yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa.

5.2 Saran

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana kritis Teun Van Dijk dengan kerangka *socio-cognitive approach*. Pendekatan ini dinilai relevan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai sebuah wacana yang disampaikan oleh aktor baik dilihat dari sisi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Sehingga dapat ditemukan motif yang melatarbelakangi wacana tersebut dapat diproduksi. Namun, perlu diketahui bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan selain menggunakan pendekatan *socio-cognitive approach* milik Teun Van Dijk, yaitu *Dialectical-Relational Approach* milik Fairclough dan *Social-Actor Approach* milik Theo Van Leeuwen. Pendekatan lain tersebut perlu dilakukan oleh peneliti selanjutnya untuk melihat wacana dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, karena isu diskriminasi tersebut masih berjalan sampai tahun 2024, peneliti berharap adanya keberlanjutan atau perubahan dalam unit analisis untuk para peneliti selanjutnya supaya penelitian ini lebih factual.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthel, J. S. (2018). *Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards: For European Commission, DG Environment*. London: Keel LLP & LMC International Ltd.,
- Bisnis Ekonomi. (2023). *Malaysia Ajak Indonesia Stop Ekspor Sawit (CPO) ke Uni Eropa*. [Internet] Diambil dari Kompas: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230112/12/1617617/malaysia-ajak-indonesia-stop-ekspor-sawit-cpo-ke-uni-eropa> pada 23 Oktober 2023.
- Bogdan, & Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- CNN indonesia. (2023). *Kronologi Ribut RI-Malaysia Vs Eropa Hingga Ancam Setop Ekspor Sawit*. [Internet] CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230113172647-92-900192/kronologi-ribut-ri-malaysia-vs-eropa-hingga-ancam-setop-ekspor-sawit> diakses pada 14 Februari 2023
- Cox, R. W. (1981). *Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations*. Millenium - Journal of International Studies: 10 (2), 126-155.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. New York: Sage Publications, Inc. .
- Dijk, T. V. (1993). *Principle of Critical Discourse Analysis*. Sage Journal: 4 (2), 50-62.
- Dijk, T.V. (2008). *Discourse and Context: A Socio-cognitive Approach*. Cambridge: Cambridge University Press
- Dugis, V. (2012). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- European Parliament. (2019). *Directive (EU) 2018/2001 Of The European Parliament And of The Council of 11 December 2018*. [Internet] European Parliament: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC/ diakses pada 1 Februari 2023

Eurostat. (2021). *Agriculture Database*. [Internet] Diambil dari eurostat: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database/> diakses pada 22 Maret 2023

EPA. (2023). *Global Greenhouse Gas Emissions Data*. [Internet] Diambil dari <https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data/> diakses pada 3 Juni 2023.

Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. New York: Addison Wesley Longman.

FAO. (2022). *OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031*. [Internet] OECD iLibrary: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/world-oilseed-projections_06376175-en/ diakses pada 10 Februari 2023

Ferreira, M. F. (2017). *Critical Theory*. In W. S. McGlinchey, *International Relations Theory* (p. 63). Bristol: E-Internasional Relations Publishing.

Foucault, M. (1984). *The Order of Discourse*. In Shapiro, *Language and Politics*. Oxford: Basil Blackwell.

Fraser, N. (1995). *From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a "Post-Socialist" Age*. *New Left Review*: 2 (12), 68-93.

Gregory, M. (2022). *Palm Oil Production, Consumption and Trade Patterns: The Outlook From An EU Perspective*. Brussels: Fern

Gatto M, Wollni M, Asnawi R, Qaim M. (2017). *Oil palm boom, contract farming, and rural economic development: Village level evidence from Indonesia*. *World Dev*: 95 (1), 127-140.

Hariandja, N. (2022). *Kala Uni Eropa Sahkan UU Produk Bebas Deforestasi, Apa Artinya bagi Indonesia?*. [Internet] Diambil dari Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2022/12/15/kala-uni-eropa-sahkan-uu->

produk-bebas-deforestasi-apa-artinya-bagi-indonesia/ diakses pada 7 Februari 2023

Hariyatmoko. (2017). *Critical Discourse Analysis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Index Mundi. (2022). *Palm Oil Production by Country*. [Internet] Index Mundi: <https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=production/> diakses pada 20 Februari 2023

Japarudin. (2016). *Wacana, Pemikiran dalam Bahasa dan Analisis Teks. El-Afekar*, 35-37.

Kinseng, R., Nasdian, F. T., Mardiyarningsih, D. I., dkk. (2023). *Unraveling Disputes Between Indonesia and the European Union on Indonesia Palm Oil: From Environmental Issues to National Dignity*. Taylor & Francis: 19 (1), 1-13

Komalasari. (2023). *Malaysia Ancam Setop Ekspor Sawit ke Uni Eropa, Bagaimana dengan RI?*. [Internet] Katadata: <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63c25cd9af507/malaysia-ancam-setop-ekspor-sawit-ke-uni-eropa-bagaimana-dengan-ri/> diakses pada 2 Februari 2023

Kompas. (2023). *Indonesia-Malaysia Sepakat Perangi Diskriminasi terhadap Kelapa Sawit*. [Internet] Diambil dari Kompas: <https://money.kompas.com/read/2023/01/09/191500826/indonesia-malaysia-sepakat-perangi-diskriminasi-terhadap-kelapa-sawit>. pada 23 Oktober 2023.

Kompas. (2023). *Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa*. [Internet] Diambil dari Kompas: <https://money.kompas.com/read/2023/02/09/173300226/indonesia-dan-malaysia-sepakat-lawan-diskriminasi-sawit-oleh-uni-eropa> pada 23 Oktober 2023.

Ling. (2019). *Global Palm Oil Trade: Prospect and Outlook*. *Malaysian-China Business Forum*, 13.

- Masitoh. (2020). *Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis*. Jurnal Elsa: 18 (1), 67-69.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- Pasimura, I., Afrizal, A., & Novarino, W. (2022). *Impact of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Certification to Environmental Behavior of Palm Oil Plantation Companies*. International Journal of Agriculture System: 10 (1), 24-43
- PASPI. (2022). *“Deforestation-Free” Policies And It’s Polemic*. Palm's Journal: 3 (15), 684 - 686.
- PASPI. (2022). *“Deforestation-Free” Policy For Palm Oil Cause Wider Global Deforestation*. Palm's Journal : 3 (19), 710 - 715.
- Perwitasari H., Sari PN (2013) *Analisis input-output komoditas Kelapa Sawit di Indonesia (Input Output Analysis of Indonesia’s Palm Oil)*. Media Agro 9(1), 11–2.
- Pratama, A. D. (2019). *Post-Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit*. Politica: 10 (2), 95-112.
- R Nurkhoiry, dkk. (2021). *Environmental Effect of Biodiesel Mandatory Policy*. ICANARD: 2 (1), 1-6.
- Rifin, F. H. (2020). *Assessing the impact of limiting Indonesian Palm Oil Exports to the European Union*. Journal of Economic Structures: 9 (26), 1 - 13.
- Roger. (1994). *A History of Communication Study: A Biographical Approach*. Michigan: Free Press.
- Simon. (2018). *EU heading for ‘zero palm oil’ in transport by 2021*. [Internet] Euractive: <https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-heading-for-zero-palm-oil-in-transport-by-2021/> diakses pada 15 Februari 2023
- Suwarno, W. (2019). *Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia*. Jurnal Hubungan Internasional: 8 (10), 23-34.

- The Chain. (2022). *The Chain: Bumitama Clarifies Sourcing Policies After Palm Oil from Deforestation-Linked PT Permata Sawit Mandiri Enters Its Mills*. [Internet] Diambil dari <https://chainreactionresearch.com/the-chain-bumitama-clarifies-sourcing-policies-after-palm-oil-from-deforestation-linked-pt-permata-sawit-mandiri-enters-its-mills/> diakses pada 23 Maret 2023.
- The Star. (2023). *Strategy to fight anti-palm oil lobby will pressure EU*. [Internet] Diambil dari The Star: <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2023/01/16/strategy-to-fight-anti-palm-oil-lobby-will-pressure-eu> pada 23 Oktober 2023.
- The Star. (2023). *More collaboration between M'sia, Indonesia to fight palm oil 'discrimination'*. [Internet] Diambil dari The Star: <https://www.thestar.com.my/news/nation/2023/06/08/more-collaboration-between-msia-indonesia-to-fight-palm-oil-discrimination> pada 23 Oktober 2023.
- Sampedro, V. (2011). *Introduction: New Trends and Challenges in Political Communication*. Sage Journal: 16 (4), 431-439.
- Saputri, D. S., & Amrullah, A. (2023). *Jokowi Ajak Malaysia Terus Lawan Diskriminasi Sawit*. [Internet] Republika: <https://republika.id/posts/41755/jokowi-ajak-malaysia-terus-lawan-diskriminasi-sawit>.
- Sprinz, D. F., & Nahmias, Y. W. (2002). *Model, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*. Michigan: Michigan University Press.
- Vijay, P. J. (2016). *The Impact of Palm Oil on Recent Deforestation and Biodiversity Loss*. PLOS ONE Journal : 11 (7), 1-19.
- Warta Ekonomi. (2023). *Indonesia dan Malaysia Perlu Perkuat Kerja Sama Hadapi Diskriminasi Minyak Sawit Eropa*. [Internet] Diambil dari Warta Ekonomi: <https://wartaekonomi.co.id/read472411/indonesia-dan-malaysia-perlu-perkuat-kerja-sama-hadapi-diskriminasi-minyak-sawit->

eropa <https://www.youtube.com/watch?v=1PA7IgoO6zE> pada 23 Oktober 2023

Weiss, Jeffrey. (2022). *Comparing Recent Deforestation Measures of the United States, European Union, and United Kingdom*. [Internet] Diambil dari <https://www.steptoeglobaltradeblog.com/2022/01/comparing-recent-deforestation-measures-of-the-united-states-european-union-and-united-kingdom/#more-2262/> diakses pada 20 Agustus 2023

Wodak, Ruth & Meyer, M. (2016). *Methods of Discourse Studies*. London: SAGE.

Yanwardhana, E. (2023). *Jokowi dan Anwar Sepakat Perangi Diskriminasi Kelapa Sawit!*. [Internet] CNBC: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230109120629-4-403935/jokowi-dan-anwar-sepakat-perangi-diskriminasi-kelapa-sawit>